

Jurnal Dinamika Global adalah jurnal ilmiah ilmu Hubungan Internasional yang diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember oleh Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Cimahi.

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UNJANI

Dewan Penyunting

Ketua

Dr. Agus Subagyo, S.IP, M.Si.

Sekretaris

Jusmalia Oktaviani, S.IP, MA

Anggota

Suwarti Sari, S.IP, M.Si

Yuswari O. Djemat, Drs, MA

Drs. Kristiyono Ratmoko, M.Si

Drs. Iing Nurdin, M.Si

Angga Nurdin, S.IP, MA

Yusep Ginanjar, S.IP, M.Si

Taufan Akbar, S.IP, M.Si

Mariane Delanova, S.Sos, MA

Nala Nastiti, S.IP, MA

Mitra Bebestari

Taufik Hidayat, Drs, MS, Ph.D

Johannes Sulaiman, MA, Ph.D

Pemimpin Redaksi

Yuswari O. Djemat, Drs, MA

Sekretaris I

Mariane Delanova, S.Sos, MA

Sekretaris II

Yusep Ginanjar, S.IP, M.Si

Distribusi/Iklan/Sirkulasi

Taufan Akbar, S.IP, M.Si.

Jurnal Dinamika Global

Jurnal ilmiah Dinamika Global diharapkan dapat menjadi wadah bagi pemikiran, wacana, dan inspirasi, terutama yang terkait dengan isu-isu dalam lingkup ilmu Hubungan Internasional.

Jurnal ini juga memberikan ruang yang luas bagi pemikiran, kajian dan, riset atau hasil penelitian berbagai fenomena global klasik dan kontemporer yang memiliki kaitan erat pada skala lokal, nasional, regional, dan global, dengan pendekatan dan gagasan baru yang orisinal yang dapat memberi kontribusi bagi kemajuan ilmu Hubungan Internasional.

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	1
Studi Hubungan Internasional di Indonesia: Peluang, Tantangan dan Prospek Agus Subagyo	2-23
Prospek Kerjasama Bilateral Indonesia–Malaysia bagi Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Yovinus	24-43
<i>Football As A Form Of Political Communication For St. Pauli Football Club Supporters</i> Kiki Esa Perdana	44-57
Optimalisasi Peran <i>ASEAN Disability Forum</i> dan Akses Pendidikan bagi Kaum Penyandang Disabilitas Jafar Fikri Alkadrie & Jeniar Mooy	58-80
Hubungan Internasional dan Kerjasama Kemanusiaan Negara Utara dan Negara Selatan (Australia dan Indonesia) Yeyen Subandi	81-102
Perencanaan Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam Penguatan Kapasitas UMKM untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Yusep Ginanjar & Kristyono Ratmoko	103-122
Menanamkan Konsep Multikulturalisme di Indonesia Zaenal Abidin AS	123-140
Tinjauan Buku <i>Asia Rising: Who is Leading?</i> Jusmalia Oktaviani	141-152

Pengantar Redaksi

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa Jurnal Ilmiah Dinamika Global Volume 1 Nomor 2 tahun 2016 sudah hadir di hadapan para peminat Ilmu Hubungan Internasional. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (HI FISIP UNJANI), Cimahi akan terus berupaya agar jurnal ilmiah ini dapat terbit secara berkala 2 kali dalam setahun. Terimakasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Pimpinan FISIP UNJANI dan para kolega akademis di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNJANI atas dukungan penuh yang tiada henti. Disampaikan terima kasih secara khusus kepada para penulis dari berbagai lembaga yang telah berkontribusi dengan artikelnya. Semoga edisi ini dapat memberi sumbangsih dan manfaat bagi pengembangan ilmu Hubungan Internasional. Tentu saja harapan kami juga dapat menjadi satu titik sumbangsih rujukan pengambilan kebijakan.

Terbitnya jurnal ilmiah ini adalah didorong oleh tuntutan dan minat yang tinggi untuk mengembangkan ruang publik wacana akademik yang terdokumentasikan, baik yang bersumber dari hasil penelitian maupun penelaahan teoritik dan empirik tentang fenomena dan dinamika global. Harapan kita tentunya kontinuitas penyajian jurnal berkala ilmiah ini dapat terus terpelihara dan terpupuk. Oleh karena itu, peran partisipatif dari para penulis dan pembaca menjadi hal yang utama. Insya Allah dalam waktu dekat juga akan ditayangkan penyajian jurnal ini dalam versi *online*.

Semoga bermanfaat, Terimakasih.

Salam hangat,
Pemimpin Redaksi

STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA: PELUANG, TANTANGAN DAN PROSPEK

Agus Subagyo

Abstract

This paper would like to analyze the development of study of International Relations in Indonesia which has progressed very rapidly. The science of lucrative International Relations since April 1919 in Britain and into Indonesian territory since the 1945's, has been in great demand by the public, gaining a place in the hearts of the social scientific community, and contributing a lot to the foreign decision-making played by the government. Therefore, it is important to look at opportunities, challenges, and prospects for the development of International Relations studies in Indonesia to date.

Key Words: *International Relations, opportunity, challenge, prospect.*

Pendahuluan

Perkembangan studi Hubungan Internasional (HI) semakin pesat, baik dalam konteks substansi, teori/metodologi, maupun epistemologi, sehingga membuat disiplin studi Hubungan Internasional diterima oleh semua komunitas keilmuan akademik, sebagai bagian dari ilmu sosial. Semenjak lahirnya ilmu Hubungan Internasional pada bulan April 1919 di Inggris (Andre, 1999:2-3), telah banyak kontribusi yang ditorehkan oleh studi Hubungan Internasional bagi perdamaian dunia, keamanan internasional, dan kerjasama internasional antar negara.

Menurut Andre (1999:2-3), pada mulanya, studi Hubungan Internasional didirikan bertujuan untuk: (1) mencegah peperangan;

(2) menciptakan perdamaian. Logikanya, Perang Dunia I terjadi karena adanya miskomunikasi, mispersepsi, dan miskordinasi antar negara-negara di Eropa ketika itu, karena saat itu, hubungan antar negara belum terlalu intensif, baik hubungan diplomatik maupun hubungan konsuler, sehingga timbulah prasangka negatif antar negara yang pada akhirnya melahirkan ketegangan, konflik, dan peperangan antar negara, yang kemudian kita kenal dengan Perang Dunia I, pada tahun 1914-1918.

Ilmu Hubungan Internasional dirancang dan didesain ketika itu untuk menghilangkan prasangka negatif antar negara dengan mempererat kerjasama antara negara melalui hubungan diplomatik dan hubungan konsuler. Artinya, perang dapat dicegah dan perdamaian dapat diciptakan apabila antar negara terdapat komunikasi, koordinasi, kerjasama dan sinergi serta interaksi yang konstruktif. Saat itu, belum ada disiplin studi yang mempelajari tentang hubungan negara dalam rangka mencegah peperangan dan menciptakan perdamaian. Dalam konteks inilah, disiplin studi Hubungan Internasional lahir di dunia dan dicetak untuk mempelajari hubungan antar negara dengan tujuan mencegah peperangan dan menciptakan perdamaian dunia.

Bermula dari Inggris (*anglo saxon*), ilmu Hubungan Internasional berkembang ke wilayah Eropa daratan (*eropa continental*), kemudian menjalar ke Amerika Serikat (*Anglo America*). Di wilayah Anglo Amerika inilah, disiplin studi Hubungan Internasional mengalami masa kejayaan dan keemasan. Setelah itu, berkembang ke wilayah negara-negara Dunia Ketiga, seperti

Amerika Latin, Asia, dan Afrika, termasuk ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Di Indonesia, disiplin studi Hubungan Internasional banyak berkembang dengan cepat di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, sehingga banyak sekali sampai dengan saat ini, masyarakat umum yang belajar, menempuh studi dan mempelajari Hubungan Internasional dengan masuk menjadi mahasiswa program studi Hubungan Internasional di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, baik dalam Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun Strata 3 (S3). Bahkan, saat ini, banyak sekali guru besar atau Profesor Hubungan Internasional yang lahir dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini tentu membuktikan bahwa disiplin studi Hubungan Internasional telah mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia.

Kemajuan ilmu Hubungan Internasional di Indonesia juga didorong oleh adanya interaksi antar dosen dan peneliti dari berbagai program studi Hubungan Internasional di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), yang menjadi wadah bagi semua dosen, staf pengajar, dan peneliti Hubungan Internasional untuk berdiskusi, *sharing* informasi, *sharing* pengalaman dan *sharing* pengetahuan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan studi Hubungan Internasional. Setiap tahun, AIHII melakukan semacam pertemuan/konvensi yang mana tuan rumahnya dilakukan secara bergantian di setiap perguruan tinggi yang ada program studi Hubungan Internasionalnya.

Di tingkat mahasiswa Hubungan Internasional, terdapat wadah untuk berdialog dan berdiskusi tentang isu-isu Hubungan Internasional dan membahas kemajuan Hubungan Internasional. Terdapat wadah seperti Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (PNMHII) dan juga terdapat Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional (PSNMHII), yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya dengan tuan rumah yang dilakukan secara bergantian atau bergiliran di perguruan tinggi yang terdapat program studi Hubungan Internasional.

Dibentuk pula berbagai komunitas tematik dalam Hubungan Internasional yang menjadi ajang bagi para dosen Hubungan Internasional untuk berdiskusi, melakukan penelitian bersama, melaksanakan seminar bersama, maupun mendorong terciptanya konsorsium akademik bagi kemajuan studi Hubungan Internasional. Telah diterbitkan pula Jurnal oleh AIHII sebagai ajang diseminasi hasil-hasil pemikiran dan hasil-hasil penelitian dalam Hubungan Internasional. Terdapat pula komunikasi intensif antar dosen melalui media sosial, membuat *group* di media sosial maupun dengan komunikasi lainnya yang tentunya sangat berguna bagi kemajuan studi Hubungan Internasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh komunitas Hubungan Internasional di Indonesia, yang sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan akhir, antara lain:

Pertama, masalah gelar akademik bagi lulusan Hubungan Internasional. Sampai dengan saat ini, gelar kesarjanaan Hubungan Internasional di Indonesia belum semuanya seragam. Di

sebagian perguruan tinggi memberikan gelar kesarjanaan Hubungan Internasional “Sarjana Ilmu Politik” (S.IP). Sebagian perguruan tinggi yang lain memberikan gelar kesarjanaan Hubungan Internasional “Sarjana Sosial” (S.Sos). Sementara itu, wacana dan perdebatan penyeragaman gelar kesarjanaan Hubungan Internasional di Indonesia terus mengemuka, dimana ada yang tetap mempertahankan gelar kesarjanaannya S.IP, ada yang bersikukuh “S.Sos”, dan ada pula yang ingin mencari alternatif lain, seperti mewacanakan gelar kesarjanaan “S.Hub Int”. Ditambah lagi dengan adanya ketentuan pemerintah, dalam hal ini, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang telah menerbitkan aturan gelar kesarjanaan “S.Sos” bagi lulusan Hubungan Internasional, yang tentunya membuat perdebatan gelar kesarjanaan Hubungan Internasional semakin panjang.

Kedua, masalah akreditasi program studi Hubungan Internasional. Dalam regulasi pemerintah memang disebutkan bahwa akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan dalam jangka panjang bisa dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT). Di program studi Kedokteran Umum maupun Kedokteran Gigi, akreditasi sudah dilakukan oleh LAM PT, bukan lagi BAN PT. Sedangkan di program studi lainnya, termasuk program studi Hubungan Internasional, akreditasi masih dilakukan oleh BAN PT. Lahir wacana untuk akreditasi program studi Hubungan Internasional dilakukan oleh LAM PT, bukan lagi BAN PT, yakni dilakukan oleh AIHII. Muncul pertanyaan, apakah AIHII sudah siap

melakukan akreditasi program studi Hubungan Internasional seluruh Indonesia? Hal inilah yang kemudian menjadi perdebatan dan sampai sekarang belum ada titik temu atau kesepakatan yang permanen.

Selain itu, masih terdapat banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh komunitas Hubungan Internasional di Indonesia, yang tentunya harus dicarikan solusi permasalahannya, supaya mampu mendukung kemajuan studi Hubungan Internasional pada masa depan. Diperlukan berbagai inovasi, kreasi, dan percikan pemikiran dari semua ilmuwan Hubungan Internasional di Indonesia untuk menciptakan “kekhasan” ilmu hubungan internasional yang berasal dari Indonesia, yang tentunya berbeda perspektif, cara pandang, dan *mindset* nya dengan ilmuwan Hubungan Internasional dari negara lain. Oleh karena itulah, tulisan sederhana ini akan mengangkat perkembangan studi Hubungan Internasional di Indonesia, dengan menyoroti kepada peluang, tantangan, dan prospek studi Hubungan Internasional di Indonesia.

Peluang

Terdapat beberapa peluang yang dapat menjadi daya dorong perkembangan Hubungan Internasional di Indonesia sehingga lebih banyak diminati oleh masyarakat umum, antara lain:

1. Arus globalisasi yang mendorong mobilisasi manusia, barang dan jasa lintas negara (*cross boundaries*), sehingga menyebabkan seolah-olah tidak ada batas-batas antar negara karena dunia sudah menjelma menjadi “kampung

dunia' (*global village*)(Baylis, 2001:13-17). Migrasi manusia dan pergerakan barang dari satu negara ke negara lain terasa lebih cepat karena didorong oleh perkembangan teknologi transportasi, yang pada akhirnya menyebabkan perkembangan hubungan antar bangsa, antar negara, dan antar masyarakat di dua negara atau lebih menjadi semakin meningkat secara pesat. Perkembangan global dan regional yang terjadi sekarang ini tentunya mendorong terbukanya peluang bagi kemajuan studi Hubungan Internasional, dimana hubungan antar manusia di dunia menjadi cepat, sehingga studi Hubungan Internasional berpotensi lebih banyak diminati oleh masyarakat. Arus globalisasi membuat masyarakat ingin tahu banyak tentang dunia luar yang tentunya dapat dipelajari melalui studi Hubungan Internasional.

2. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, yang mendorong semua warga negara di dunia dapat berinteraksi dimana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun, dalam hitungan detik dan menit, tanpa dihalangi oleh tembok-tembok yurisdiksi negara dan bahkan negara dengan pranatanya tidak mampu menghalangi komunikasi dan interaksi warga negaranya melalui dunia maya (Yulius, 2007: 239-241). Hal ini mendorong terjadinya “pertemanan”, “persaudaraan”, relasi bisnis, dan bahkan hubungan pribadi antara dua warga negara yang berbeda kewarganegaraan, sehingga membuka mata masyarakat akan pentingnya membuka diri terhadap dunia luar, dunia internasional, dan

dunia global, yang pada gilirannya menumbuhkan rasa ingin tahu tentang hubungan antar negara ataupun hubungan internasional. Melalui perkembangan teknologi informasi, internet, media *online*, media sosial dan dunia maya, maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk mengetahui, memiliki minat, dan mempelajari Hubungan Internasional. Pada masa lalu, untuk mengetahui informasi dan gambaran umum negara lain, maka agak kesulitan karena harus membaca buku maupun mendapatkan informasi terbatas baik dari media massa maupun dari cerita orang lain. Namun, saat ini, untuk mengetahui selang pandang maupun berbagai informasi apapun dari negara lain yang ingin diminati maupun dikunjungi, dapat dengan mudah membuka internet, melihat *website*, *youtube*, maupun media sosial lainnya. Hal ini kemudian mendorong semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang tertarik untuk mempelajari dan mengkaji studi Hubungan Internasional.

3. Perkembangan teknologi transportasi, khususnya dunia penerbangan yang semakin maju pesat dengan tumbuhnya maskapai yang menawarkan penerbangan murah antar negara sehingga mendorong setiap warga negara di berbagai dunia dapat secara bebas dan mudah untuk melakukan aktivitas ke luar negeri baik untuk kegiatan pendidikan, ketenagakerjaan, bisnis, olahraga, pariwisata, maupun kegiatan ritual keagamaan, sehingga terjadilah interaksi antar warga negara, mengenal sosial budaya masyarakat antar negara dan terjalin hubungan intensif antar warga

negara. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan bebas visa antar negara yang dilakukan oleh masing-masing negara dalam lingkup yang terbatas, kelonggaran perijinan visa antar negara, dan promosi wisata dari berbagai negara untuk saling kunjung dan saling bekerjasama dalam perekonomian, sosial budaya maupun keagamaan, mendorong hubungan antar negara semakin erat, yang pada gilirannya menarik minat masyarakat Indonesia untuk mempelajari, mengkaji, dan meminati studi Hubungan Internasional. Studi Hubungan Internasional yang awalnya dianggap sulit dipelajari, studi kaum “elit”, hanya diminati oleh “kelas menengah ke atas”, sudah mulai luntur dan bergeser, karena masyarakat arus bawah, masyarakat menengah ke bawah maupun kaum non elit pun semakin besar menaruh minat untuk belajar Hubungan Internasional.

4. Kerjasama *sister city*, *sister regency*, dan *sister province*, yang saat ini marak di Indonesia, khususnya pada era reformasi, otonomi daerah, dan desentralisasi yang membuka peluang bagi setiap pemerintahan daerah (Pemda), baik pemda kabupaten, kota maupun propinsi di Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dari negara lain baik kerjasama ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, maupun keagamaan, telah membuka mata semua aparat birokrasi pemerintahan, aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), di berbagai daerah untuk lebih banyak mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan pihak luar negeri,

melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah negara lain, membuat perjanjian/*Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pihak negara lain, maupun melakukan diplomasi/negosiasi dengan pejabat negara lain, dan melakukan penyambutan keprotokoleran terhadap kehadiran/kedatangan/kunjungan pejabat daerah dari negara lain (Syarifudin Tippe & Agus Subagyo, 2016: 26-29). Semua pemangku kepentingan di pemerintahan daerah di Indonesia mulai menyadari pentingnya untuk mempelajari studi Hubungan Internasional dan bahkan melirik para sarjana Hubungan Internasional untuk mengisi jabatan Biro/Bagian/Bidang Kerjasama Luar Negeri yang ada di SOTK pemda propinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini dilakukan agar Pemda mampu berhubungan luar negeri dalam kerangka *sister city*, *sister regency*, maupun *sister province*. Hal inilah yang kemudian mendorong minat masyarakat maupun aparat pemerintahan daerah untuk belajar dan menempuh studi Hubungan Internasional.

Tantangan

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh komunitas Hubungan Internasional sehingga mempengaruhi peminatan masyarakat untuk belajar studi Hubungan Internasional di Indonesia sehingga berdampak pada arah perkembangan Hubungan Internasional pada masa depan, antara lain:

1. Kekhawatiran masyarakat umum/publik bahwa penstudi Hubungan Internasional harus handal, jago, dan lancar

berbahasa internasional, khususnya bahasa Inggris, sehingga banyak di antara masyarakat yang kurang berminat untuk masuk dalam program studi Hubungan Internasional. Anggapan masyarakat umum ini memang benar dimana ketika belajar Hubungan Internasional sudah seharusnya menguasai bahasa internasional, terutama bahasa Inggris. Banyak masyarakat umum yang tertarik dengan masalah internasional dan menguasai pengetahuan hubungan internasional, namun terkendala oleh kemampuan bahasa internasional, khususnya bahasa Inggris. Masalah penguasaan bahasa internasional sebenarnya bisa dipelajari, bisa dilatih, dan bisa dibiasakan melalui pendidikan, pelatihan, dan membiasakan berbahasa internasional di kelas, di luar kelas, maupun di tengah masyarakat, secara bertahap. Mahasiswa Hubungan Internasional bisa mempraktikkan bahasa Inggris misalnya antar sesama mahasiswa yang dilakukan secara rutin, teratur dan intensif.

2. Luasnya jangkauan pengetahuan yang harus dipelajari, dibahas, dan dikuasai oleh para penstudi Hubungan Internasional. Studi Hubungan Internasional mempelajari semua aspek kehidupan internasional yang menuntut para mahasiswa Hubungan Internasional memahami, menguasai dan mengetahui semua hal yang berbaur internasional. Paling tidak, para penstudi Hubungan Internasional harus memiliki kemampuan dasar tentang negara-negara di dunia beserta dinamika politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Para penstudi hubungan internasional harus

mengetahui tentang minat kawasan dan minat teori dalam hubungan internasional. Meskipun dalam studi Hubungan Internasional ada spesialisasi studi dan konsentrasi studi, akan tetapi tetap saja para penstudi Hubungan Internasional harus minimal mengetahui, memahami, dan menguasai semua pengetahuan dasar Hubungan Internasional, baik pengetahuan dasar aktor dan isu Hubungan Internasional maupun pemahaman dasar sejarah dunia dan sejarah negara-negara di dunia.

3. Lulusan dari program studi Hubungan Internasional sangat terbatas untuk masuk dalam dunia kerja profesi diplomat di Kementerian Luar Negeri. Dalam hitungan angka, jumlah lulusan Hubungan Internasional di berbagai perguruan tinggi di Indonesia setiap tahun jumlahnya ribuan, sementara kuota untuk masuk menjadi diplomat karier di Kementerian Luar Negeri hanya mencapai hitungan ratusan. Itupun tidak hanya kuota untuk sarjana Hubungan Internasional saja, melainkan dari beberapa program studi yang lain, misalnya program studi Hukum, Bahasa Inggris, Komunikasi dan lain-lain. Sudah menjadi stigma di tengah masyarakat bahwa masuk program studi Hubungan Internasional berarti ingin menjadi diplomat, namun untuk menjadi diplomat sangat sulit. Bahkan, ada sebagian perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Hubungan Internasional yang mulai dari berdirinya sampai dengan saat ini belum ada lulusannya yang mampu diterima menjadi diplomat di Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, dalam praktiknya,

banyak lulusan Hubungan Internasional yang bekerja di perbankan, perusahaan, pers, pemerintah daerah, dan *Non Governmental Organization* (NGO).

4. Masih ada masyarakat yang di tingkat bawah, khususnya di pedesaan, kawasan perbatasan, daerah terpencil dan yang jauh dari perkotaan, yang belum tahu apa itu studi Hubungan Internasional, mempelajari tentang apa itu Hubungan Internasional, dan akan menjadi apa lulusan Hubungan Internasional, yang tentunya mempengaruhi peminatan terhadap studi Hubungan Internasional. Ditambah lagi adanya persepsi dan pandangan sebagian masyarakat umum bahwa studi Hubungan Internasional adalah studi yang abstrak, elitis, dan hanya cocok untuk orang-orang level menengah ke atas saja. Pandangan keliru yang berkembang di tengah masyarakat ini pada gilirannya akan semakin mengkrystal yang pada akhirnya dapat mempengaruhi minat sebagian masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mengambil program studi Hubungan Internasional.

Prospek

Melihat peluang dan tantangan peminatan studi Hubungan Internasional di Indonesia, maka terdapat prospek studi Hubungan Internasional yang cerah. Artinya, adanya globalisasi, perdagangan bebas, pasar bebas, kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, yang menciptakan interaksi antar negara, antar bangsa dan antar warga negara di dunia telah melahirkan masa depan Hubungan Internasional yang menjanjikan, khususnya bagi studi Hubungan Internasional maupun bagi para lulusan Hubungan Internasional.

Adapun prospek studi Hubungan Internasional pada masa depan, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Minat topik. Artinya, banyak sekali saat ini topik, tema, isu maupun fokus kajian dalam studi Hubungan Internasional, mulai dari isu-isu yang bersifat *high politics* (*politico military security*/perang, pertahanan, keamanan, militer, persenjataan, nuklir) sampai dengan isu-isu *low politics* (ekonomi, bisnis, sosial budaya, lingkungan hidup, energi, pangan, migrasi, pariwisata). Para penstudi Hubungan Internasional dapat mempelajari berbagai tema, topik, isu maupun fokus kajian sesuai dengan peminatannya masing-masing, sehingga terbuka lebar untuk mempelajari secara mendalam dan mendetail. Para penstudi Hubungan Internasional memang diberi ruang untuk memilih topik sesuai dengan selera, kemauan, kemampuan, dan *passion*-nya masing-masing tanpa dibatasi harus memilih peminatan tertentu saja, sehingga dalam perkembangannya akan

mendorong studi Hubungan Internasional semakin maju pesat, multidisipliner, dan interdisipliner. Banyaknya isu-isu yang mengemuka dalam hubungan internasional akan mendorong perkembangan studi Hubungan Internasional menjadi lebih dinamis, *up-to-date*, dan menciptakan ruang kebebasan akademik bagi penstudi Hubungan Internasional untuk berinteraksi dengan disiplin ilmu lain yang beririsan dengan disiplin studi Hubungan Internasional. Hal inilah yang kemudian akan melahirkan pakar-pakar Hubungan Internasional dengan spesialisasi yang beragam, misalnya pakar keamanan global, pakar lingkungan hidup global, pakar pertahanan global, pakar keamanan *cyber*, pakar pariwisata global, pakar bisnis internasional, dan lain-lain.

2. Minat kawasan. Artinya, sampai dengan saat ini, banyak sekali *region/kawasan/wilayah* di berbagai belahan dunia yang sedang tumbuh, berkembang, dan bahkan bergejolak, lengkap dengan dinamika perubahan, permasalahan, konflik maupun peperangan antar negara yang dengan beragam dimensi, yang pada akhirnya akan dapat mendorong peminatan terhadap kawasan/*region*. Kawasan yang maju pesat, (seperti Amerika Utara, Eropa Barat dan Asia Timur), kawasan sedang tumbuh (seperti Asia Tenggara, Amerika Latin), kawasan konflik (seperti Timur Tengah dan Asia Selatan), maupun kawasan miskin (Afrika) merupakan bahan analisis yang perlu diangkat, dipelajari dan diminati oleh para penstudi Hubungan Internasional. Peminatan terhadap kawasan akan semakin meningkat mengingat dinamika

persoalan di kawasan sangat kompleks, khususnya adanya blok-blok kerjasama regional, komunitas ekonomi regional, maupun isu-isu regionalisme, yang tentunya akan sangat menarik untuk diminati secara khusus oleh penstudi Hubungan Internasional. Peminatan terhadap kawasan ini tentunya akan menambah percepatan kemajuan Hubungan Internasional yang dapat berkontribusi pada kemajuan global. Hal inilah yang kemudian akan melahirkan pakar-pakar Hubungan Internasional, seperti pakar Timur Tengah, pakar Asia Timur, pakar Eropa Barat, pakar Amerika Latin, dan lain-lain.

3. Minat paradigmatis. Artinya, sampai dengan saat ini, banyak sekali penstudi Hubungan Internasional yang tertarik dan memiliki minat kajian pada aspek konseptual teoritik dan paradigmatis dari studi Hubungan Internasional. Banyaknya pendekatan, paradigma dan aliran pemikiran dalam Hubungan Internasional mendorong penstudi Hubungan Internasional untuk fokus pada kajian dan analisis terhadap aspek konsep, teori dan metodologi dalam Hubungan Internasional yang ditinjau baik dari aspek epistemologi, aksiologi maupun ontologi, sehingga semakin menambah kekayaan berpikir dalam studi Hubungan Internasional. Dalam perspektif studi Hubungan Internasional, terdapat banyak sekali paradigma, seperti paradigma idealis, utopis, realis, pluralis, liberalis, marxis, strukturalis, globalis, kosmopolitanis, konstruktivisme, yang kemudian mengalami metamorfosa dan pada akhirnya muncul pula paradigm

varian seperti neoidealisme, neorealis, neoliberalis, neomarxis, neostrukturalis, dan lain-lain. Hal ini kemudian mendorong penstudi Hubungan Internasional untuk memfokuskan diri pada kajian pemikiran, konseptual, teoritik, metodologik dan paradigmatis. Dalam perkembangan ke depan, akan muncul pakar Hubungan Internasional dengan spesialisasi pada pakar kosmopolitanisme, pakar *post modernism*, pakar konstruktivisme, pakar neorealis, pakar teori kritis, dan lain-lain.

Sedangkan prospek lulusan Hubungan Internasional ke dalam dunia kerja tak kalah cerahnya, hal ini dapat dilihat dari peluang kerja dan kesempatan kerja sebagai berikut:

1. Peluang kerja menjadi diplomat pada Kementerian Luar Negeri RI. Artinya, peluang kerja utama yang biasanya dikejar oleh para lulusan/sarjana Hubungan Internasional adalah bekerja di Kementerian Luar Negeri RI untuk menjadi Diplomat. Hal ini sesuai dengan "*image*" atau citra di tengah masyarakat bahwa masuk kuliah di program studi Hubungan Internasional adalah persiapan menjadi calon diplomat. Hal ini beralasan karena program studi Hubungan Internasional dirancang kurikulumnya umumnya untuk mencetak para calon diplomat sehingga semua materi perkuliahan, mata kuliah, maupun praktik simulasinya pun dirancang agar lulusannya mampu memiliki kompetensi menjadi diplomat. Namun demikian, untuk menjadi diplomat tidaklah mudah, karena peminatnya sangat banyak,

sedangkan kuota/formasi setiap tahunnya di Kementerian Luar Negeri sangat terbatas. Hal inilah yang kemudian melahirkan kompetisi/persaingan yang sehat dan ketat. Pada praktiknya, yang banyak masuk menjadi Diplomat pada Kementerian Luar Negeri adalah para lulusan/sarjana/alumni dari perguruan tinggi negeri ternama saja, sedangkan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang kurang terkenal akan mengalami kesulitan masuk menjadi Diplomat di Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, tidak semua lulusan Hubungan internasional bekerja di Kementerian Luar Negeri menjadi Diplomat, namun bekerja di bidang lain yang tentunya tidak kalah prospektifnya.

2. Para lulusan Hubungan Internasional memiliki peluang kerja sebagai dosen maupun peneliti di berbagai perguruan tinggi, lembaga riset nasional/internasional. Menjadi dosen dan peneliti adalah pengabdian dan pekerjaan yang mulia sehingga tidak sedikit para lulusan Hubungan Internasional bekerja dan berprofesi sebagai dosen dan peneliti, untuk menyebarkan wawasan keilmuan Hubungan Internasional kepada mahasiswa maupun melakukan riset Hubungan Internasional agar menemukan hal baru yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan Hubungan Internasional. Terlebih lagi, saat ini, banyak sekali perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang membuka program studi Hubungan Internasional, sehingga membuka peluang bekerja menjadi dosen dan peneliti, meskipun menjadi dosen dan peneliti

masih jauh aspek kesejahteraannya dibandingkan dengan dosen dan peneliti di negara-negara maju lainnya.

3. Para lulusan Hubungan Internasional banyak yang bekerja di lembaga pemerintahan/pemerintahan daerah, lembaga internasional, NGO internasional, perusahaan media massa, wartawan, maupun perusahaan perbankan dan *finance* internasional. Dalam kenyataannya, banyak sekali lulusan sarjana Hubungan Internasional yang justru bekerja dan berprofesi di luar arus *mainstream* diplomat, dosen, peneliti, melainkan justru bekerja di berbagai perusahaan asing, lembaga perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan media, maupun sebagai pegiat di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO baik nasional maupun internasional, sehingga ini menjadi prospek yang sangat bagus bahwa sarjana Hubungan Internasional bisa fleksibel dan diterima di pangsa pasar kerja yang lebih luas. Hal ini tentunya didukung oleh banyaknya program studi Hubungan Internasional di Indonesia yang banyak memfokuskan diri pada spesialisasi tertentu, misalnya program studi Hubungan Internasional yang memiliki konsentrasi diplomasi pertahanan, diplomasi publik, otonomi daerah, komunikasi internasional, bisnis internasional, keamanan internasional, *e-diplomacy*, dan lain-lain.

Catatan Penutup

Disiplin studi Hubungan Internasional adalah disiplin ilmu sosial yang sangat kompleks, interdisipliner, dan multidisipliner sehingga memerlukan ketekunan bagi para penstudi Hubungan Internasional untuk terus mendalami, mempelajari, menghayati, dan menganalisis setiap perkembangan yang terjadi dalam ranah dan domain Hubungan Internasional. Disiplin ilmu Hubungan Internasional telah banyak diakui oleh masyarakat keilmuan sebagai ilmu yang menjanjikan, ilmu yang penting dalam mengelola hubungan antar bangsa, dan ilmu yang bermanfaat bagi interaksi antar warga negara di dunia di tengah arus globalisasi, pasar bebas, dan perdagangan bebas.

Peluang peminatan studi Hubungan Internasional di Indonesia sangat bagus dimana banyak sekali masyarakat yang ingin belajar dan menempuh studi di program studi Hubungan Internasional. Hal ini tentu didorong oleh adanya arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi, kemajuan teknologi transportasi, kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga di luar negeri dalam kerangka *sister city*, *sister province*, dan *sister regency*.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan studi Hubungan Internasional sehingga masih ada masyarakat yang enggan menaruh minat pada studi Hubungan Internasional adalah stigma di tengah masyarakat bahwa masuk program studi Hubungan Internasional harus jago dan mahir berbahasa asing, minimal bahasa Inggris, luasnya jangkauan kajian Hubungan Internasional sehingga terkesan kajian yang abstrak dan semu,

lulusan Hubungan Internasional yang sedikit peluang kerjanya menjadi diplomat karier, serta masih adanya masyarakat bawah di pedesaan yang kurang memahami apa itu Hubungan Internasional.

Adapun prospek lulusan Hubungan Internasional sangat menjanjikan karena selain bisa menjadi diplomat karier, juga dapat mengembangkan kompetensi pada bidang-bidang pekerjaan yang lain, seperti menjadi dosen, peneliti, manager pada LSM/NGO internasional, wartawan, editor, redaktur, PNS di lembaga pemerintahan/pemerintah daerah, bekerja di perusahaan asing maupun perusahaan perbankan, asuransi maupun dunia kerja lainnya.

Daftar Pustaka

- Andre H. Pareira, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999)
- Baylis, John & Steve Smith, *The Globalizations of World Politics : An Introduction to International Relations*, (Oxford : Oxford University Press, 2001)
- Burchill, Scoot dan Andrew Linklater (ed.), *Theories of International Relations*, (London : Macmillan Press Ltd, 1996).
- Jones, Walter S., *Logika Hubungan Internasional : Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia Baru*, (terj.), (Jakarta : Gramedia, 1993).
- Mohtar Mas'ood & Riza Noor Arfani (ed.), *Isyu-Isyu Global Masa Kini*, (Yogyakarta : PAU- Studi Sosial, 1990).

- Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional : Displin dan Metodologi*, (Jakarta : LP3ES, 1990).
- Sorensen, Georg dan Robert Jackson, *Introductions of International Relations*, (Oxford : Oxford University Press, 1999).
- Syarifudin Tippe & Agus Subagyo, *Kapita Seleka Hubungan Internasional*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016)
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory : Realism, Pluralism, and Globalism*”, (London : Maxwell Macmillan, 1987).
- Yulius P Hermawan (ed.), *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu, dan Metodologi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007)

**PROSPEK KERJASAMA BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA
BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH
PERBATASAN**

Yovinus

Abstract

Opportunities and challenges in today's era of globalization also affect the relationship between Indonesia and Malaysia. As the two allied countries which have a sea and land borders, there are many issues that arise as a result of interaction between citizens of both countries and the issue of political and territorial issues which sometimes led to tensions between the two countries. In spite of it all there is another problem that is actually more substantial and that is people welfare. Commonly the border region can be regarded as disadvantaged areas, and most of its inhabitants live in poverty. This indicated the failure of both governments take advantage of the potential of natural resources and human resources as well as the geographical conditions that actually have great potential to improve the well-being of border residents. However, with a good cooperation and mutual benefit in the future pattern of the pattern of bilateral cooperation has a great opportunity in order to improve the welfare of society.

Key Words: *Bilateral Cooperation, People Welfare, Border Residents*

Pendahuluan

Kecenderungan globalisasi dan desentralisasi tentu telah dan akan membawa banyak perubahan bagi Indonesia dan Malaysia. Berbagai isu yang muncul di masing-masing negara yang terkait dengan kecenderungan di atas adalah masalah pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan isu pendidikan serta isu dan

permasalahan politik, hukum dan budaya. Tidak terlepas dari isu – isu utama tersebut adalah bagaimana kedua negara serumpun tersebut dapat menjawab berbagai tantangan globalisasi dan desentralisasi guna mewujudkan kemakmuran bersama (Alisjahbana, Arminda S. dkk, 2007).

Terkait pembangunan dan kesejahteraan, berbagai konsep kerjasama dua negara telah digulirkan dengan berbagai kesepakatan dan saling pengertian seperti halnya dalam Sosek-Malindo, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), forum kerjasama kawasan (*Masyarakat Ekonomi Association of South East Asia Nations (ASEAN)/MEA*). Meski demikian, berbagai permasalahan dan tantangan juga muncul seiring dinamika sosial, kawasan dan persinggungan kepentingan serta kedaulatan kedua negara. Dalam beberapa hal, pihak Indonesia kerap merasa dirugikan atas manuver Malaysia terhadap wilayah-wilayah privat kedaulatan Indonesia seperti klaim Malaysia atas wilayah yang secara historis dan geografis adalah milik Indonesia (Sipadan-Ligitan), dugaan pergeseran patok batas wilayah yang disinyalir dilakukan secara sengaja oleh pihak Malaysia, klaim terhadap beberapa produk kebudayaan Indonesia, persoalan perlindungan tenaga kerja migran asal Indonesia, protes Malaysia atas bencana kabut asap yang berimbas terhadap wilayah Malaysia (meskipun dalam beberapa kasus kebakaran hutan di Indonesia juga melibatkan para pengusaha perkebunan Malaysia) dan lain-lain.

Tulisan ini secara khusus akan menyoroti dinamika hubungan bilateral Indonesia – Malaysia dalam beberapa aspek, dan pada akhirnya ingin melihat “celah” bagi prospek kerjasama

kedua negara khususnya di wilayah perbatasan di tengah pasang surut hubungan diplomatik kedua negara. Sejauh ini, kerjasama yang dibangun oleh kedua negara masih berkuat pada hal-hal yang bersifat makro, dan seringkali “berhati-hati” dalam membangun kesepahaman dalam lingkup kesejahteraan bersama. Faktor historis konfrontasi kedua negara pada era pemerintahan Orde Lama tampaknya masih cukup membekas, dan kadangkala timbul riak-riak di wilayah Indonesia jika terjadi persoalan diplomatik di antara kedua negara. Wilayah perbatasan kedua negara terutama di kawasan Sabah dan Sarawak adalah area konflik yang masih menyimpan memori buruk bagi hubungan kedua negara serumpun ini. Di pihak lain, persoalan ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan di wilayah perbatasan masih jauh tertinggal jika dibanding wilayah-wilayah inti atau pusat-pusat kota. Ini merupakan fakta mirisnya nasib warga perbatasan kedua negara yang sesungguhnya menyimpan potensi besar, baik sumber daya alam maupun manusia bagi peningkatan kualitas kesejahteraan dalam semangat keserumpunan.

Globalisasi ekonomi khususnya di kawasan Asia Tenggara (MEA), pada akhirnya juga mempengaruhi dinamika perekonomian di kawasan perbatasan. Hal ini ditambah lagi dengan perhatian pemerintah yang sejauh ini telah mengambil langkah-langkah konkrit bagi pembangunan kawasan perbatasan. Sepanjang Tahun 2016-2017, presiden Joko Widodo telah meresmikan beberapa pos lintas batas antar negara diantaranya di perbatasan Badau-Lubuk Antu (Kabupaten (Kab.) Kapuas Hulu Kalbar), Sajingan – Aruk (Kab. Sambas Kalbar) dan modernisasi pol lintas batas di Entikong

di Kab. Sanggau. Berbagai program pembangunan tersebut menandakan membaiknya kinerja pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan. Selain itu, berbagai peluang ekonomi dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraanpun akan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan karena mobilitas manusia dan barang akan teradministrasi dengan baik dan akan berdampak baik pula terhadap kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Terlepas dari pasang surut dinamika politik, sosial dan diplomatik di antara kedua negara, komitmen untuk mensejahterakan warga perbatasan telah terwujud dalam pembangunan pos lintas batas di perbatasan kedua negara. Terhambatnya pembangunan pos lintas batas di antara kedua negara pada masa lalu salah satunya disebabkan oleh belum sinkronnya kesepakatan untuk membuka jalur transportasi di perbatasan darat kedua negara, karena realisasi pembangunan pos lintas batas hanya akan terwujud jika kedua negara telah memiliki komitmen dan kebijakan bersama di antara kedua negara karena menyangkut aspek pembangunan fasilitas di pos perbatasan di wilayah masing-masing. Ini merupakan langkah awal yang baik bagi pengembangan kerjasama kedua negara dalam aspek-aspek lain. Sebagai dua negara yang serumpun, hendaknya semangat kekeluargaan dapat dijadikan sebagai fondasi dalam membangun perbatasan sebagai “zona kemakmuran bersama.”

Kesenjangan Pembangunan dan Dilema Kemiskinan Warga Perbatasan

Bangun (2014) mengungkapkan bahwa pada level lokal, permasalahan yang dihadapi oleh warga perbatasan berupa keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, mahalnya harga barang dan jasa, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta penyebaran penduduk yang tidak merata. Pada level nasional permasalahan yang dihadapi oleh daerah perbatasan antara lain, berupa kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada daerah perbatasan, serta kurangnya personil, anggaran fasilitas dan kesejahteraan; terjadinya perdagangan lintas batas ilegal, kurangnya akses serta media komunikasi serta informasi dalam negeri, serta belum optimalnya komunikasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan. Sementara pada level internasional/regional, persoalan wilayah perbatasan muncul sebagai akibat lemahnya lobi dan kreativitas pemerintah di tingkat nasional. Berbagai peluang yang ada baik di kawasan ASEAN dan juga pembangunan nasional ternyata tidak bisa terangkai dengan baik bagi upaya pemenuhan hak ekonomi masyarakat. Berbagai kesenjangan prasarana dan sarana yang terjadi pada daerah perbatasan khususnya antara Malaysia dan Indonesia, masih belum diperhatikan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah, telah diupayakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Otda) dengan mempertimbangkan kemampuan pembangunan daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pembangunan

masih diperlukan perhatian yang lebih besar khususnya kepada daerah yang terbelakang, daerah yang padat, dan daerah yang sangat kurang penduduknya, daerah transmigrasi, daerah terpencil, daerah perbatasan. Hal tersebut sudah tercantum sejak masih diberlakukannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkelanjutan, berhasil guna dan berdaya guna pada setiap tingkatan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan daerah diupayakan sesuai dengan potensi dan prioritas daerah yang bersangkutan (Budianta, 2010).

Sejak dahulu hingga zaman teknologi dewasa ini, wilayah perbatasan negara masih saja menjadi halaman paling belakang di negeri ini, meski banyak deklarasi yang menyatakan bahwa kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan sebuah negara. Dalam kenyataannya belum terlihat adanya pembenahan-pembenahan yang berarti dari pemerintah, bahkan sejauh ini proses pembangunan masih dirasakan sangat lambat dan jalan di tempat. Masalah-masalah yang melanda seolah tanpa solusi, seperti misalnya masalah kemiskinan yang kian membelenggu masyarakat perbatasan yang mendiami wilayah perdesaan. Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Jagoi Bababang Kalimantan Barat masih ditandai dengan keterisolasian wilayah, keterbelakangan ekonomi dan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, maraknya pekerja ilegal (*illegal workers*) serta menjamurnya praktik perdagangan manusia (*human trafficking*). Praktik perdagangan ilegal di wilayah perbatasan ini

memang sangat sulit terdeteksi oleh aparat keamanan perbatasan negara. Hal ini dikarenakan banyaknya jalur tikus untuk aksi penyelundupan, baik itu barang-barang ilegal maupun praktik penyelundupan manusia (Niko, 2016).

Dalam konteks negara, wilayah perbatasan melingkupi daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan dengan wilayah teritorial negara tetangga, sedangkan dalam konteks administrasi, wilayah perbatasan lebih diartikan sebagai bagian dari suatu wilayah administrasi tertentu yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi lain di sekitarnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua tipe wilayah perbatasan tersebut merupakan wilayah integral pelaksanaan pembangunan Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk lebih pemeratakan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh pelosok negara. Dalam rangka pengurangan ketimpangan wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) tahun 2004-2009 (Peraturan presiden/Pepres No. 7/2005) telah mengamanatkan bahwa pengembangan daerah tertinggal termasuk wilayah perbatasan terintegrasi dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi, melalui keterkaitan mata rantai proses produksi dan distribusi antara wilayah-wilayah tertinggal dengan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh (Budianta, 2010).

Potensi Kerjasama Sosial dan Ekonomi di Wilayah Perbatasan

Pembangunan ekonomi dan infrastruktur merupakan program strategis yang dapat diwujudkan dalam waktu yang relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan bidang-bidang lain seperti Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam konteks ini, pemerintah pusat mesti responsif dan menyederhanakan sistem birokrasi secara khusus di wilayah perbatasan. Hal ini terkait dengan banyaknya kewenangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang tidak dimiliki oleh pemerintah daerah terutama dalam kerjasama dengan pemerintah Malaysia. Keteringgalan kawasan perbatasan memang perlu untuk diselesaikan dalam sebuah kebijakan yang terpadu antar sektor, hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat, daerah, aparat TNI dan masyarakat lokal yang kesehariannya menggantungkan hidupnya dari aktivitas-aktivitas yang saling berinteraksi dengan warga Malaysia.

Berkaca dari peningkatan sektor ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan Entikong dimana pos lintas batas transportasi antar negara yang dibangun pada tahun 1990, titik-titik perbatasan lain juga perlu untuk dibenahi. Di Kalimantan Barat secara administratif terdapat 5 Kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kelima wilayah tersebut adalah Kabupaten Sanggau, Bengkayang, Sambas, Sintang dan Kapuas Hulu. Dari keseluruhan wilayah tersebut, baru Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong yang telah menjalankan fungsi keimigrasian secara penuh. Padahal beberapa wilayah seperti Sintang dan Bengkayang juga memiliki garis perbatasan yang

cukup panjang. Hal ini menyebabkan kondisi masyarakat di perbatasan Kabupaten Sintang dan Bengkayang belum sepenuhnya memiliki akses resmi untuk melaksanakan berbagai aktivitas termasuk perekonomian. Hal ini turut berkontribusi dalam meningkatnya berbagai aktivitas ilegal di wilayah perbatasan.

Maraknya aktivitas ilegal di wilayah perbatasan, di samping menunjukkan lemahnya pengawasan dan tata kelola wilayah perbatasan, juga sekaligus mengindikasikan besarnya potensi ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat jika pengelolaannya dilakukan secara resmi. Berbagai potensi komoditas perkebunan seperti lada, jagung, kelapa sawit, kemudian potensi hasil hutan, tenaga kerja dan perdagangan dapat difasilitasi dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung, seperti jalan, jembatan, pasar, pos lintas batas resmi dan regulasi yang berpihak pada masyarakat lokal. Dengan demikian, sedikit demi sedikit kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dan mengurangi angka kemiskinan di wilayah perbatasan.

Kerjasama sosial dan ekonomi antar dua negara di wilayah perbatasan, sebetulnya sudah menjadi tradisi turun temurun. Sebagai dua negara serumpun, terpisahnya dua wilayah akibat pembagian teritorial Indonesia dan Malaysia tetap berlanjut baik secara legal maupun illegal. Di wilayah-wilayah yang cukup jauh dari PPLB, interaksi masyarakat antar kedua negara cukup intensif bahkan ada banyak warga perbatasan Indonesia yang memiliki kartu Identitas Malaysia, bekerja di wilayah Malaysia hingga turut

menikmati pelayanan publik di wilayah Malaysia. Pada masa yang akan datang, pemerintah Indonesia dan Malaysia hendaknya tidak lagi menerapkan regulasi-regulasi kaku bagi masyarakat perbatasan dua negara tersebut. Dalam prinsip-prinsip kerjasama yang dilandasi kesepahaman dan kekeluargaan kedua negara mesti bertekad untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga kedua negara melalui kerjasama-kerjasama di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain.

Jika komitmen yang dibangun antar kedua negara dapat diwujudkan, maka dampak sosialnya akan besar bagi warga perbatasan, terutama dalam membangun kehidupan dan kesejahteraan bersama negara yang bertetangga dekat. Sebagai bangsa yang serumpun, Indonesia dan Malaysia tidak seharusnya menutup rapat perbatasan meskipun sudah hidup dalam kawasan teritorial yang berbeda. Pengalaman Eropa dalam membangun kerjasama unilateral dalam forum Masyarakat Eropa (Uni Eropa), telah mampu mengangkat derajat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Eropa yang masih tertinggal seperti negara-negara yang terletak di Eropa bagian timur. Masyarakat perbatasan yang bertahun-tahun hidup dalam ketertinggalan dan keterisolasian menginginkan persoalan-persoalan birokrasi antar kedua negara tidak lagi berimbas pada kehidupan dan kesejahteraan mereka. Dengan potensi-potensi yang dimiliki, kesejahteraan dan prospek perkembangan perekonomian dapat terwujud dengan kebijakan pembangunan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung aktivitas perekonomian, pendidikan, kesehatan, pertanian dan lain sebagainya.

Pembangunan ekonomi, pelayanan publik, infrastruktur dan ketertiban sosial yang relatif lebih baik di wilayah Malaysia dapat menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah diplomatik dalam membangun wilayah Indonesia. Pemerintah tidak perlu merasa gengsi karena selama ini perbandingan *output* pembangunan di wilayah kedua negara ini telah merekonstruksi persepsi publik bahwa pemerintah Malaysia lebih berhasil dalam implementasi pembangunan di wilayah mereka. Mirisnya adalah fakta historis bahwa Indonesia lebih dahulu memperoleh kemerdekaan, bahkan pada fase-fase awal pembangunan di wilayah Malaysia, mereka mendatangkan para guru, profesional, dan para pengajar untuk membangun Malaysia. Dengan perencanaan, tata kelola, dan implementasi pembangunan yang lebih baik pada awal tahun 90-an Malaysia mampu menyalip Indonesia dan menjadi wilayah ekonomi baru yang lebih maju dan berkembang.

Kontribusi Pemerintah Malaysia Bagi Warga Perbatasan Indonesia

Menurut pengakuan masyarakat, di wilayah-wilayah perbatasan yang terpencil kontribusi pemerintah dan masyarakat Malaysia cukup tinggi bagi perekonomian masyarakat. Di beberapa wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu yang terpencil banyak di antara masyarakat yang bekerja dan mencari nafkah di wilayah Malaysia. Beberapa juga menikmati fasilitas pendidikan, kesehatan bahkan kependudukan bagi mereka yang memiliki kartu kependudukan Malaysia. Dalam

hal-hal tertentu pemerintah Malaysia memberi ruang yang cukup bagi masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi dan bekerja di beberapa wilayah Malaysia. Media-media Malaysia seperti radio, televisi dan surat kabar asal negeri jiran tersebut juga dapat diakses dengan mudah oleh warga perbatasan. Hal ini cukup membantu warga perbatasan yang daerah pemukimannya terletak jauh dari pusat-pusat wilayah administratif kecamatan atau kabupaten terdekat. Fasilitas teknologi, informasi dan infrastruktur di wilayah perbatasan Malaysia yang dekat dari jangkauan warga perbatasan Indonesia berkontribusi dalam mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Secara umum mayoritas masyarakat perbatasan berprofesi sebagai petani atau pekebun. Wilayah perbatasan yang topografi wilayahnya sebagian besar didominasi oleh dataran tinggi cukup baik untuk ditanami lada, jagung dan padi. Sudah menjadi cerita umum bahwa komoditas-komoditas pertanian dan perkebunan tersebut dijual pada para pengusaha asal Malaysia. Sebagai salah satu komoditas yang memiliki harga yang tinggi, lada menjadi primadona yang mampu mensejahterakan para petani perbatasan. Dari beberapa pengakuan warga perbatasan, para bos asal Malaysia bersedia memodali usaha para petani lada tersebut, menyediakan fasilitas kendaraan, dan menampung hasil perkebunan tersebut dengan harga yang tinggi. Pemerintah Malaysia sejauh ini belum terlalu mempermasalahkan berbagai aktivitas tersebut. Alasannya adalah bahwa interaksi antar warga kedua negara di wilayah perbatasan telah berlangsung secara

turun temurun, dan tidak berdampak negatif terhadap kawasan teritorial Malaysia.

Sebagai negara yang relatif lebih makmur, ada banyak warga Indonesia yang menggantungkan nafkah dengan bekerja di berbagai sektor. Umumnya sebagian besar warga Indonesia bekerja di perkebunan-perkebunan, rumah tangga, buruh bangunan dan infrastruktur lain dan sedikit yang bekerja di bidang konsultan, dan menjadi pengusaha. Malaysia dapat dikatakan sebagai solusi dari sulitnya mencari lapangan pekerjaan di Indonesia. Hal positifnya adalah bahwa, para pekerja asal Indonesia dipersepsikan lebih ulet, rajin, pekerja keras, penurut dan kualitas pekerjaannya di atas rata-rata. Ada banyak para pekerja asal Indonesia yang hidup berkecukupan setelah pulang mengumpulkan ringgit dari Malaysia. Mereka mampu mengumpulkan modal untuk usaha di daerah asalnya, membangun rumah ataupun membeli kendaraan. Inilah mengapa pemerintah Indonesia dianggap perlu untuk membangun sebuah kerjasama yang saling menguntungkan kedua negara dalam kerangka kerjasama yang lebih rill dan memusatkan aktivitasnya di sepanjang wilayah perbatasan kedua negara.

Membangun Kesepahaman Menuju Kesejahteraan Bersama dalam Lingkup Negara Serumpun

Langkah-langkah membangun kesepahaman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga yang tertinggal dan hidup dalam kemiskinan dan keterisolasian adalah sebagai berikut:

1. Membangun kesepahaman antara kedua negara dalam perjanjian bilateral khusus wilayah perbatasan.
2. Merealisasikan model-model pembangunan yang saling menguntungkan antar kedua negara di wilayah perbatasan negara.
3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan dan keamanan yang selama ini telah berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan, tingginya angka kemiskinan, timbulnya kesan bahwa masyarakat perbatasan adalah masyarakat yang marginal.
4. Menghindari isu-isu sensitif historis yang dapat melahirkan sikap saling curiga dan persaingan tidak sehat antar kedua negara.
5. Mempromosikan semangat persaudaraan bahwa Malaysia dan Indonesia adalah negara serumpun yang hendaknya saling mendukung satu sama lain.

Sikap saling tidak peduli dan menempatkan wilayah perbatasan kedua negara sebagai prioritas terbawah dalam perencanaan pembangunan sudah seharusnya segera diakhiri. Berbagai upaya pemerintah Indonesia yang mulai melakukan penataan konstruktif di wilayah perbatasan akan berjalan dengan baik dengan dukungan dan kerjasama dengan pihak Malaysia.

Dengan kebijakan yang baik dan konstruktif, wilayah perbatasan dapat didesain menjadi zona strategis dalam bidang perdagangan, industri, pariwisata, transportasi dan kebudayaan. Keberhasilan Batam sebagai wilayah perbatasan dengan Singapura dapat dijadikan rujukan untuk menciptakan situasi yang serupa di perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia. Batam menjadi destinasi menarik dalam sektor kepariwisataan, industri dan perdagangan karena pihak Singapura juga merasakan manfaat yang besar dari kerjasama dengan pihak Indonesia dalam pengelolaan kawasan perbatasan kedua negara.

Memadukan kesepahaman dengan komunikasi yang intensif antar kedua negara merupakan langkah awal dari prospek pembangunan yang lebih besar pada masa yang akan datang. Wilayah perbatasan adalah masa depan Indonesia, terutama dalam menghadapi globalisasi ekonomi kawasan (MEA) bahkan global. Dengan 3 negara dalam satu kawasan yang saling berdekatan, pos-pos lintas batas tersebut pada akhirnya akan menjadi gerbang dalam mobilitas barang dan manusia antar negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darusalam, hingga negara-negara ASEAN yang lain. Memang saat ini pos-pos lintas batas tersebut masih relatif sepi dan belum menunjukkan interaksi ekonomi skala besar, tetapi dengan adanya prioritas dan komitmen yang kuat antar negara, pada masa yang akan datang wilayah-wilayah perbatasan justru akan berbalik menjadi kawasan yang lebih maju dan kesejahteraan masyarakatnya menjadi meningkat.

Analisis Peluang dan Tantangan Kerjasama Indonesia-Malaysia di Wilayah Perbatasan

a. Peluang

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sejauh ini telah membuka diri untuk saling bekerja sama dalam berbagai sektor. Jika dianalisis kerjasama terbesar masih dalam bidang perlindungan dan penempatan pekerja migran asal Indonesia, bidang pendidikan, pariwisata dan kebudayaan. Anehnya, dalam bidang perekonomian kedua negara yang hidup dalam wilayah yang relatif dekat justru tidak mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi dalam skala besar. Indonesia justru mencatat transaksi perdagangan yang cukup besar dengan negara-negara yang secara geografis terletak jauh seperti Eropa, Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea bahkan Afrika.

Sebagai dua negara yang memiliki kapasitas perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara, kerjasama perekonomian Indonesia-Malaysia berpeluang untuk menjadi kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia. Hal ini karena sebagai negara yang terletak di kawasan tropis, Indonesia dan Malaysia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Sektor pertanian, kehutanan, kelautan, pertambangan, minyak dan gas (migas) dan pariwisata seharusnya cukup untuk memakmurkan kehidupan warga kedua negara. Fenomena kemiskinan yang cukup besar di Indonesia menandakan adanya kesalahan dalam sistem

pelaksanaan pembangunan. Dengan komitmen dan kerja keras, berbagai peluang tersebut dalam terwujud dalam realisasi kerjasama pembangunan dan industri yang mampu menyerap tenaga kerja, menyediakan kebutuhan masyarakat dengan biaya murah dan modernisasi dalam teknologi pengelolaan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan pariwisata.

b. Tantangan

Dinamika politik global seringkali menjadi penghambat realisasi kerjasama yang baik di antara kedua negara. Pihak Malaysia tampak berhati-hati dalam membangun kesepakatan-kesepakatan dalam kerangka kerjasama bilateral di bidang ekonomi, investasi dan teknologi dengan Indonesia. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh masih rendahnya kepercayaan publik maupun pemerintah Malaysia terhadap kemampuan Indonesia dalam mengelola kerjasama ekonomi. Banyaknya kasus korupsi, kepastian hukum yang rendah, politisasi birokrasi, stabilitas politik yang menurun, serta adanya sentimen anti-Malaysia dalam beberapa kelompok masyarakat Indonesia menjadi tantangan yang perlu untuk diatasi melalui kesepahaman dan diplomasi yang intensif.

Selain itu, tekanan dari negara-negara “Patron” menjadikan pihak Indonesia sulit untuk berinovasi dan mengelola sendiri potensi-potensi yang dimilikinya. Hingga

saat ini sektor pertambangan, industri, teknologi dan otomotif hingga 70% masih dikuasai oleh negara-negara besar. Hal ini menimbulkan keraguan dari pihak Malaysia bahwa kehadiran mereka dalam perekonomian akan menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari minimnya investasi Malaysia dalam bidang pertambangan, migas, industri, teknologi dan lain-lain. Wilayah-wilayah investasi tersebut justru didominasi oleh Jepang, Korea, Cina, Eropa dan Amerika Serikat.

Kesimpulan

Ada banyak sektor yang prospektif di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang dapat dikembangkan melalui kerjasama antar kedua negara. Beberapa sektor prospektif tersebut adalah bidang ekonomi dan perdagangan, pembangunan, kehutanan dan pertanian, kepariwisataan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan membangun kesepahaman sebagai negara serumpun dan secara geografis sangat dekat, maka diharapkan kondisi sosial, ekonomi, pembangunan, budaya dan kesejahteraan secara umum dapat lebih ditingkatkan. Kerjasama bilateral yang diharapkan oleh warga di perbatasan kedua negara lebih pada terbitnya regulasi yang mempermudah akses transportasi, mobilitas barang dan orang, serta kerjasama kedua negara di berbagai bidang pada zona-zona wilayah perbatasan. Jika ini dapat direalisasikan dengan baik, maka wilayah perbatasan akan tumbuh menjadi wilayah yang berkembang, maju dan modern serta akan berdampak positif pula pada kesejahteraan warga di perbatasan kedua negara.

Daftar Pustaka

- Alisjahbana, Arminda S. dkk. 2007. *Indonesia dan Malaysia dalam Era Globalisasi dan Desentralisasi*. Bandung : Universitas Padjadjaran
- Bangun, Budi Hemawan. 2014. *Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat-Sarawak (Pusat Studi Perbandingan)*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Budianta, Aziz. 2010. *Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia*. Palu: Jurnal SMARTek.
- Niko, Nikodemus. 2016. *Kemiskinan Sebagai Penyebab Strategis Human Trafficking di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat*. Jakarta: Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPACT.

FOOTBALL AS A NEW FORM OF POLITICAL COMMUNICATION FOR ST. PAULI FOOTBALL CLUB SUPPORTERS

Kiki Esa Perdana

Abstract

The development of political communication has changed the conventional concept of politics and football. A broader understanding of political system and democracy has led football into something new, football is a new form of media and supporter is conveying a message. This article assesses how supporters use football as a medium for political purpose and how the involvement for supporters in the process. The results indicated that in the end, political communication is a process and affected by a political culture in society.

Keywords: *political communication; football supporters; international media; mass communication*

Introduction

Political communication, defined as all communications involving political messages and political actors, relating to power, government, and policies, is one of the most powerful channels in shaping public opinion through mass media. This means that public opinion, i.e. the aggregate of individual attitudes or beliefs held by the adult population, is by and large the result of political communication itself.

Modern human life in this world can be divided into many categories of interest and activity, and sports is surely one of the fields that is increasingly important. Within this category, football

may be considered as the world's most popular sport, attracting the attention of people on global scale with big events, such as world cup and national competitions broadcast transnationally, and also being one of the most important activities humans choose for physical exercise.

In general terms the history of modern football starts in 1863 with the establishment of the English Football Association (FA). This agency together with subsequent organizations such as the World Football Federation FIFA. Issued the basic standard rules for the football game, and regulated referee assignments, as well as the transfer of the players. In 1908 football became part of the Olympics games while FIFA also started the football championship between nations in what is popularly known as the World Cup.

The history of football in Germany itself officially began in January 28, 1900, when Deutsche Fussball-Bund (German Football Union) formed in Leipzig. The foundation for football's rapid rise to vast popularity amongst the German people and the DFB's progress towards becoming a sporting authority of high importance on a socio-political level was laid. Milestones in these developments were the introduction of the German championship in 1903, the formation of the national team, who began playing their games in 1908 and the outlining of national and regional associations, as well as the implementation of the DFB general assemblies. Today, about 25,000 clubs organized in DFB with nearly 170,000 teams and over two million active players, DFB become the largest membership sports federation in the world.

St. Pauli is a district located in the Hamburg-Mitte, on the right bank of the Elbe river, the Landungsbrücken are a northern part of the port of Hamburg. The big port of Hamburg in St. Pauli led many sailors to Hamburg who preferred to spend their spare St. Pauli. Since then has been many bars, cheaper living cost and it is still best known as Hamburg's red-light district area, named Reeperbahn.

St. Pauli football club began their first match in 1907 and officially established in may 1910. The team on their early years, played in lower level competition in Germany. The club formed as it represents the sailors, lower working class and political activist who live and work in St Pauli district. In the mid 1980s, the transition in St. Pauli began, from ordinary and traditional football club, St. Pauli changing into modern club. Further, the supporters of St. Pauli football club adopted crossed skull and bone as their unofficial icon, which symbolized the poor against rich clubs, they also show their commitment about social activism and anti-fascism political activity. St. Pauli football club is the first football club in Germany who officially forbid right-wings political activity on their stadium.

St. Pauli well known as world's most left-wing football club. On 2014, St. Pauli supporters invited many street artist from many countries to help them with the "Millerntor Gallery", a program itself is a creative platform, inviting people to take part in a discourse concerning sustainable responsibility. The focus lies on the work of global artists, which generates stimuli for the visitors through an aesthetic experience. This discourse can be experienced

through the universal languages of art, music and football, and the communal activities act in a meaningful and activating manner. This unconventional gallery incorporates scientific and political components, and uses public panels and expert discussions in order to scientifically question the concept's meaningful scope, and to make the discourse accessible to a broad public. All of the event's profits benefit Viva con Agua's projects, which have the objective to relieve the global problem of insufficient water and sanitary supplies (<http://millerntorgallery.org/>, accessed December 9 2016). During PAGIDA movement in 2015 that attracted wide range of football supporters in Germany, especially football hooligans from Cologne and Dresden. St. Pauli FC given its club friendly match against Borussia Dortmund with match-motto "Refugees Welcome". Around 1,000 migrants, mostly from Middle East and Africa, in various accommodations around Hamburg are invited. St. Pauli is also inviting their supporters and residents living near the stadium to meet the migrants and get to know them.

Football in general, and more particularly in St. Pauli FC, have been institutions used as a medium for political purposes: clubs are associations with the political activist to attract others who may be persuaded to support the political interests attached to the club. Attributes and symbols associated St. Pauli FC are used by political activist and become prevalent during their social campaign periods. Because of a variety of advantages and as logical consequences of the entanglement between football and politics, St. Pauli has become very attractive as political media used by political activist to delivered their messages.

Literature review

Communication studies (Hovland 1953, Mulyana 2005) is a social science which deals systematically with every side of human communications, in which individual (the communicator), transmit stimuli (usually verbal symbols) to modify the behavior of other individual. Of course, any human statement, as a core object of this scene, has many different aspects to analyze, such as what media did they use, what feedback they receive and try to trigger, the techniques and methods of the statements, system, etc. This definition is simple, but serves to explain the relation to other fields of study, including politics (Anwar 1988).

Brian McNair define political communication as “purposeful communication about politics”, that mean that its not only covers verbal or written statement, but also representations such as dress or logo design (McNair 2003). With other words, it includes all aspects that may develop a “political identity” or “image”. Pipa Norris stated that “The process operates down-wards from governing institutions towards citizens, horizontally in linkages among political actors, and also upwards from public opinion towards authorities” (Norris 2004). Political communication process moves in horizontal and vertical planes and anyone may become a political actor of their own accord.

Football’s capability to mobilize the masses has been well-established, by the fact it has become the world’s most popular sport in the world. Furthermore, as Alexander Cárdenas puts it “Football represents a professional activity, an instrument to

mobilize the masses, a profitable business, also a focus of violence and unrest, and most recently, it has emerged as a tool for social development and peace” (Cardenas 2014). Media cover, sponsors and access to large groups of supporters, provide distinct advantage to the majority of the political elites.

Government, as one of political communication actors, is most active not only in normal political communication channels, but also in football. In United Kingdom in 1997 in order to cope with social problem, the role of government was needed, and a special football task force was established (Brown 2002). This football task force job was assigned to eliminate racism in football, improve disabled access in stadium to ticket pricing policies, which had become a big problem in the UK during the early stage of the English Premiere league. The UK football task force was also recommended to other European countries by the UK Government, to maximize their own social and economic benefits of sports.

Supporters also play a big part on political communications. In an example about Livorno supporters in the Italian Football competition, Mark Doidge explains how “through match day choreographies, supporters present their political affiliation” (2013). Other than having a strong working class background when ruled by the Medici family for four centuries, Livorno's place in history was also written in 1921 when the Italian Communist Party was established there. With their strong historical background in politics, it is not uncommon for Livorno supporters to stage a variety of political protests to raise awareness on specific issues in the stadium. The same things are also conducted by ultras group in

Spain, as stated by Spaaij and Viñas “although various radical political ideologies has existed within the ultras scene from the start, they had now been transformed into a major influence for group identification” (Spaaij & Vinas 2005). This studies make it clear how football can be a media in delivering a political message and also as an example of how supporters connect politics with football and become political actors. My research will broach similiar issues among supporters group of St. Pauli.

Harrop explain about political marketing, cited by Kolovos and Harris, that “political marketing as being not just about political advertising, party political broadcasts and electoral speeches but covering the whole area of party positioning in the electoral market” (Harrop 1990, Kosovos & Harris 2005). Political elites who have a particular involvement in a football could be interpreted as having a strategic political position. A wide variety of political messages can be conveyed more effectively, due to direct contact and ability to understand their constituents in the realm of football.

Political message can be achieved in various ways, one of them is to make use of them any potentials football provides. This essay is envisioned to bring a new perception on political communication, especially in football, how football has become a tools of political expression and propaganda to shape the public opinion.

Discussion

Political message in the process of political communication in modern era signed with broader understanding of political system and broader understanding of democracy. Political messages are implemented on various (verbal and non-verbal) dynamic situation and condition, use alternative media and alternative places.

The actor in political communication, not only the elected officials or government employees on any level involved in an issue, but also any person, group, or private organization that has a large influence on a political situation or issue. It means, political actors are political participation that based on rights of freedom to speak out, assemble and associate; the ability to take part in the conduct of public affairs; and the opportunity to register as a candidate, to campaign, to be elected and to hold office at all levels of government (<http://www.un.org> accessed December 10 2016). On this point of view, supporters is a political actor, their identities are often constructed on divides such as locality, social-class, religion or political view. Many football clubs well known for its supporters, some of them not only for their songs and performances, but for their political views. The actions of supporters are occasionally extreme and some of them may influenced by political ideologies, ranging from those who recognized from nationalists to anti-fascist. In recent decades, the culture of supporters has become a vocal point for the movement against the commercialization of sports and football in particular.

The media used by the actors also changing, from traditional media, modern media and now are being followed by new media, where media texts and images are more easily accessible than ever through digital databases. The mass communication no longer only related to newspaper, magazine, and book publishing, radio, television, film, or even via internet as mediums disseminating information, news and advertising, but also through music, art, and even football. Football as the most popular sports has a lot advantages, the more attendees or viewers with full coverage and live broadcast, the broader message delivered. Football now considered as an effective intermediary on conveying an information from sender to audience efficiently.

The comprehension of football is media with supporters sending out various political message is clearly possible. Football and politics have always proved a tangible mix. Tuñón and Brey stated that sports interacts with both social (cultural) and political dimensions within the ongoing globalization process. Football, nowadays the most popular sport world wide, makes those interactions even more visible and evident (Tunon &Brey 2012). Football has become a strong identity builder in many countries. Various issues brought up, from social movement into radical political ideologies, football obviously have often been used with evident and varying political aims.

On 1980s, Hamburg and German football are penetrated by fascist hooligans who support neo-nazi, St. Pauli at that time are port district inhabited many sailors come from all over the world. A place who accustomed with diversity, St. Pauli suddenly becoming

an escapement for those who disagree with fascism and neo-nazi. Nowadays in St. Pauli FC, supporters are highly organized and critical, they promote movement with a distinct anti-racist, anti-homophobic and anti-sexist stance, committed to political action and social education inside and outside Germany. And also during the 1980s, local squatters, anarchists, sex workers, students and punks started filling the creaking terraces of the Millerntor Stadium, giving it a very different character. While the rest of German football was mired in Nazism, St Pauli took a more progressive path.

Some of their organized activities are; Anti-fascist research and discussions (2006), visit to Yad Vashem memorial site in Israel (2008), discussion of the influence of right extremism on the Polish fan scene (2009), congress in Lüneburg “Active against Nazis” (2010), memorial day “Remember for the Future” to commemorate the liberation of Auschwitz (2010), a yearly Anti-racist tournaments among supporters worldwide, project KiezKick which engages in socially educative, ethnically and gender inclusive free training and fun activities, humanitarian aid for forced laborers in Belarus (2007) and viva con Agua, a project promoting access to clean drinking water in developing counties. With strong political background supporters group in St. Pauli FC preserve their identities that maturely formed, the identities as leftist that represent low working class. Those characters what made them different from others.

St. Pauli football club has been affected by all sorts of changes manifested in its immediate environment, has actively

demonstrated its interest in matters that not only in football, but also go beyond the realm of football (<https://www.fcstpauli.com> accessed 8 december 2016). Driven by an identity that commands social reform, the supporters of St. Pauli FC have certainly played impressive role in reshaping fandom in German football. St. Pauli FC made available the necessary socio-political conditions for expressing political message through football culture. Playing football under the banners of leftism, the club succeeded in developing an appealing identity that was not only famous in Germany or Europe, but also around the world.

Conclusion

Political communication activity in the end is a process, parts and also affected by a political culture in society. But at the same time, political communication is also established, maintain and bequeath political culture, concerning their message structure and patterns.

This political communication process happens in every level in society and on every possible places for information exchanges not only by government or political elites, but also between individuals or groups. Political communication in St Pauli can not be separated from their local identities that holds strong culture on politics and social movement. Political communication in St Pauli are still represent and characterized as low working class politics.

In the end the message on modern political communication could delivered into various medium, including football. St Pauli FC has the capacity becoming media that conveying political aspiration from those who grows with strong political identity that they maintained from past to the world.

Bibliography

Arifin, Anwar, 1988, Ilmu Komunikasi: Sebuah Pangantar Ringkas, Jakarta, Rajawali.

Brown Adam, 2000, European football and the European union: Governance, participation and social cohesion — towards a policy research agenda, Soccer & Society, 1:2, 129-150,

C. Hoepfl, Marie. 1977. Choosing Qualitative Research: A Primer for Technology Education Researchers. Jurnal of technology Education. Volume 9, Number 1. Virginia Tech.

Cárdenas Alexander, 2014, The Global Journey of Football: From the origins of the beautiful game to its recent use as a social catalyst, Hamburg, Anchor Academic Publishing 2014.

Creswell, J. W., V. L. Plano Clark, M. Gutmann, and W. Hanson 2003 Advanced Mixed Methods Research Designs. In Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research. A. Tashakkori and C. Teddlie, eds. Pp. 619-637. Thousand Oaks, CA: Sage.

- Doidge Mark, 2013, 'The birthplace of Italian communism': political identity and action amongst Livorno fans, *Soccer & Society*, 14:2, 246-261.
- Driscoll, David L.; Appiah-Yeboah, Afua; Salib, Philip; and Rupert, Douglas J., "Merging Qualitative and Quantitative Data in Mixed Methods Research: How To and Why Not" (2007). *Ecological and Environmental Anthropology* (University of Georgia). Paper 18.
- Spaaïj Ramón, Viñas Carles, 2005, Passion, politics and violence: A socio- historical analysis of Spanish ultras, *Soccer & Society*, 6:1, 79-96
- Kolovos, Ioannis, harris Phil. 2005. Political marketing and political communication: the relationship revisited. Otago University research archive. University of Otago.
- L. Berg, Bruce. 2001. *Qualitative research methods for the social sciences* / Bruce L. Berg. -- 4 th ed. Boston. Allyn and Bacon.
- Mcnair, Brian. 2011. *Political Communication Bundle: An Introduction to Political Communication (Communication and Society)*. Routledge; 5 edition. New york. Routledge, Francis & Taylor Group.
- Mulyana, Deddy, 2005, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Norris, Pippa. "Political Communication: Technological Diffusion and Democracy." International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. .Pergamon/Elsevier Science, 2001

W. Creswell, John. 2007. Qualitative inquiry and research design, choosing among five approaches. California. Sage Publications.

Digital source:

<http://edition.cnn.com/2010/SPORT/football/08/18/football.st.pauli.punks/>

<https://www.fcstpauli.com/en/club/history/>

<http://www.reeperbahn.org.uk/hamburg.asp?show=history>

<http://www.shortlist.com/entertainment/when-punk-and-football-collide>

<https://www.theguardian.com/football/blog/2015/sep/06/st-pauli-club-that-stands-for-all-the-right-things-except-winning>

Optimalisasi Peran *ASEAN Disability Forum* dan Akses Pendidikan bagi Kaum Penyandang Disabilitas

Jafar Fikri Alkadrie
Jeniar Mooy

Abstract

One of the ASEAN Socio Cultural Community's priority sectors in ASEAN Community 2015 is social development and welfare focused on the fulfillment of the rights of vulnerable groups including persons with disabilities. To support this sector, in 2011, the Bali Declaration underlined several aspects that could support the fulfillment of the basic rights of persons with disabilities in Southeast Asia, one of which is the activation of the ADF (ASEAN Disability Forum) as a container that has a role in mainstreaming Disability issues in policy making of ASEAN member countries.

In this regard, this article seeks to explain how the conditions of education of persons with disabilities in ASEAN member countries and the role and performance of the ADF and its contribution to persons with disabilities in Southeast Asia. The author also describes how the field conditions, obstacles and barriers and optimization actions that can make this ADF program to be successful and succeeded in accordance with the initial ideals previously intended.

Key Words: *ASEAN Disability Forum, awareness enhancement, education, disability*

Pendahuluan

Association of South East Asia Nations (ASEAN) merupakan suatu organisasi regional yang bertujuan mewadahi kerja sama antara negara-negara di Asia Tenggara dalam berbagai bidang. Pada akhir tahun 2015, sebagai bukti dan realisasi komitmen dalam meningkatkan level integrasi di antara ke-10 negara anggotanya, ASEAN sudah mulai mewujudkan komunitas ASEAN dengan tiga pilar utama pembangunan kawasan yakni, APSC (*ASEAN Political Security Community*), AEC (*ASEAN Economic Community*), dan ASCC (*ASEAN Socio Cultural Community*). Khusus untuk pilar ASCC, salah satu dari 18 sektor yang diprioritaskan dalam *blueprint*-nya adalah sektor pembangunan dan kesejahteraan sosial yang mana kerja sama dalam sektor ini akan difokuskan kepada pemenuhan hak dan akses yang sama bagi kelompok rentan (*vulnerable groups*) seperti, wanita, anak-anak, lansia, dan kaum penyandang disabilitas (ASEAN, 2012).

Salah satu bentuk implementasi kerangka kebijakan yang tertera dalam *blueprint* ASCC khususnya dalam sektor pembangunan dan kesejahteraan sosial ialah pembentukan *Bali Declaration on The Enhancement of The Role and Participation of The Persons with Disabilities in Asean Community* yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing negara anggota ASEAN. Deklarasi ini dibuat sebagai pernyataan keseriusan ke-10 negara anggota ASEAN termasuk Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar kaum penyandang disabilitas di Asia Tenggara sebagai salah

satu anggota *vulnerable groups* yang kerap menjadi objek diskriminasi sosial (ASEAN, 2011).

Sejalan dengan deklarasi ini, ASEAN juga berkomitmen mengaktifkan peran ADF (ASEAN Disability Forum) sebagai suatu forum yang berperan mengarusutamakan isu disabilitas dalam kebijakan-kebijakan pembangunan negara-negara ASEAN (Wulansari, 2014). Sayangnya, dengan mempertimbangkan kondisi terkini dari para penyandang disabilitas di Asia Tenggara, rasanya tak heran jika banyak pihak merasa pesimis akan komitmen yang dituangkan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN dalam Deklarasi Bali.

Keberadaan ADF yang diharapkan mampu membawa kemajuan bagi kehidupan kaum disabilitas pun kerap kali diragukan. Pasalnya, realita yang ada menunjukkan bahwa memang masih banyak penyandang disabilitas yang belum bisa mendapatkan akses terhadap hak-hak fundamentalnya; seperti kehidupan dan pekerjaan yang laik serta pengakuan dari lingkungan sosialnya.

Taraf hidup para penyandang disabilitas pun masih terbilang rendah disebabkan kesulitan mereka untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai apalagi hingga ke level perguruan tinggi. Padahal, pendidikan merupakan sarana terbaik bagi kaum penyandang disabilitas untuk mendapatkan pengetahuan yang kelak andil dalam menentukan kesuksesan mereka di masa depan.

Perihal kurangnya infrastruktur pendukung, perhatian pemerintah, dan pemahaman masyarakat akan potensi kaum

disabilitas di negara Indonesia sendiri, membuat para penyandang disabilitas di Indonesia masih belum bisa mengakses hak-hak dasar mereka khususnya hak untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya yang sebenarnya sudah dijamin dalam pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar kaum penyandang disabilitas memang perlu menjadi catatan khusus bagi setiap negara di dunia. Dalam laporan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (Sekjen PBB) Ban Ki Moon yang berjudul *Mainstreaming Disability in The Development Agenda: Towards 2015 and Beyond (Report of The Secretary-General)* pada tahun 2012, ditegaskan bahwa tindakan perlindungan, peningkatan partisipasi, dan pengakuan terhadap kaum penyandang disabilitas membutuhkan komitmen yang berkelanjutan di berbagai tingkatan, baik nasional, regional maupun global (United Nations Economic and Security Council, 2012).

Khusus di tingkat regional, kawasan Asia Tenggara sejatinya telah memiliki ADF sebagai wadah yang ideal untuk mengharmonisasikan komitmen negara-negara di Asia Tenggara dalam meningkatkan taraf hidup kaum penyandang disabilitas di negaranya masing-masing. Yang dibutuhkan hanyalah suatu langkah konkrit dan aplikatif yang akan membantu mengoptimalkan peran dan dampak wadah ini terhadap perbaikan kehidupan khususnya akses terhadap pendidikan bagi kaum disabilitas di Asia Tenggara.

Berangkat dari pemahaman ini, penulis berusaha menggaris-bawahi adanya suatu tantangan bagi ADF untuk memaksimalkan perannya sebagai wadah berkumpulnya pemerintah, para penyandang disabilitas, dan perwakilan masyarakat sipil di Asia Tenggara untuk tidak hanya sekedar menjadi sarana yang menampung dan memfasilitasi diskusi di antara pihak-pihak ini, tetapi juga membantu menginisiasi dan mendukung suatu langkah strategis yang dapat diterapkan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar kaum disabilitas khususnya hak untuk memperoleh pendidikan. ADF harus mampu menggerakkan para *stakeholder* negara-negara ASEAN untuk mengambil suatu langkah strategis guna penyadaran masyarakat akan pentingnya akses pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas.

Kerangka Teori

Liberalisme Institusional

Liberalisme institusional merupakan salah satu varian neoliberalisme di samping liberalisme sosiologis, liberalisme interdependensi, dan liberalisme republikanisme. Teori liberalisme sendiri mengidentifikasi adanya hubungan saling ketergantungan antara aktor-aktor dalam Hubungan Internasional yang *notabene* tidak hanya mencakup negara-negara, tetapi juga aktor non negara seperti individu dan kelompok masyarakat tertentu. Kehadiran aktor negara dan non negara membuat pola

hubungan saling ketergantungan antaraktor dalam Hubungan Internasional mengambil bentuk *complex interdependence* (Jackson & Sorensen, 2010, hal. 43).

Eksistensi *complex interdependence* lebih lanjut menyebabkan kehadiran suatu aktor mensyaratkan kehadiran dan bantuan aktor lain (Keohane & Nye, 1977). Dalam teori liberalisme institusional, adanya kebutuhan akan bantuan satu sama lain ini membuat aktor-aktor dalam Hubungan Internasional membutuhkan suatu wadah yang dapat mengatur berjalannya interaksi di antara mereka dan wadah yang dimaksud adalah institusi internasional. Suatu institusi internasional tidak hanya dapat menyediakan wadah tetapi juga menjadi sarana dan instrumen yang baik bagi para aktor untuk berkumpul, berdiskusi, dan berkerja sama menyelesaikan suatu persoalan (Lamy, 2008, hal. 132).

Dalam memandang eksistensi suatu negara, teori liberalisme institusional melihat negara sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional, tetapi bukan satu-satunya aktor yang dapat membawa dampak signifikan dinamika Hubungan Internasional. Teori ini juga memandang institusi internasional sebagai suatu entitas yang kehadirannya akan sangat menguntungkan suatu negara.

Di bawah naungan suatu institusi, suatu negara dapat memaksimalkan *absolute gain*-nya melalui kerja sama dengan negara lain. Selain itu, melalui institusi internasional, suatu negara juga mendapat akses yang lebih baik untuk melangsungkan

pertukaran informasi dengan negara-negara lain terkait isu tertentu, mempelajari strategi penyelesaian masalah dari negara-negara lain, dan yang terpenting, memaksimalkan pencapaian kepentingan nasionalnya (Lamy, 2008, hal. 132).

Kosmopolitanisme

Kosmopolitanisme merupakan salah satu doktrin normatif yang ada dalam studi Hubungan Internasional. Sebagai suatu doktrin normatif, konsep ini memberikan penekanan pada isu-isu yang bersifat normatif seperti ketidakadilan sosial dan hak asasi manusia yang tidak hanya berupa fakta-fakta empiris belaka tetapi juga sarat akan nilai-nilai moral. Terdapat beberapa asumsi dasar dari konsep kosmopolitanisme yang pada dasarnya menyoroti nilai-nilai yang dimiliki individu dan eksistensi suatu komunitas sosial sebagai komponen penyokong politik dunia (Jackson & Sorensen, 2010, hal. 292).

Asumsi yang pertama ialah bahwa dalam suatu negara, setiap individu harus diperlakukan dengan adil karena semua individu memiliki nilai-nilai yang sama, yang membuat posisi mereka sederajat. Keanggotaan dari suatu negara tidak boleh menghalangi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar dari seorang individu (Shapcott, 2008, hal. 196).

Asumsi kedua dari kosmopolitanisme berkaitan dengan hakikat konsep ini sebagai pendekatan normatif dalam Hubungan Internasional yakni kepercayaan bahwa nilai-nilai moral bersifat universal dan harus dapat diterapkan kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Kaum kosmopolitanisme percaya bahwa terdapat

nilai-nilai moral dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini sehingga nilai-nilai tersebut harus dijunjung tinggi oleh negara dan negara harus dapat memastikan nilai-nilai ini tidak diganggu oleh pihak manapun. Dalam suatu komunitas, haruslah dibuat aturan-aturan yang melindungi nilai-nilai moral yang berlaku bagi seluruh anggota komunitas. (Shapcott, 2008, hal. 195).

Asumsi ketiga dari kosmopolitanisme —sejalan dengan asumsi kedua— secara khusus menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan dianggap memiliki prioritas moral yang jauh melebihi kepentingan nasional sehingga suatu negara harus selalu mengupayakan pemenuhan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan bagi rakyatnya.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan asumsi ini diungkapkan 2 kewajiban dari aktor-aktor internasional yaitu untuk melakukan *positive duties* dan *negative duties*. *Positive duties* merupakan kewajiban untuk melaksanakan *humanitarian obligations* misalnya memberi bantuan kepada korban bencana alam dan korban perang dan *negative duties* merupakan kewajiban untuk tidak melakukan/menghindari segala bentuk tindakan yang membahayakan keselamatan dan atau menyinggung martabat orang lain seperti upaya-upaya diskriminasi (Shapcott, 2008, hal. 197).

Kondisi Pendidikan Kaum Penyandang Disabilitas di Negara-negara Anggota ASEAN



Gambar 1

Perlakuan yang tidak adil terhadap para penyandang disabilitas di negara-negara anggota ASEAN ternyata cukup banyak utamanya dalam bidang pendidikan. Menurut data PBB, melalui *Economic and Social Commission for Asia-Pacific (ESCAP)* diperkirakan di Asia-Pasifik termasuk ASEAN, kurang dari 10% dari total anak-anak penyandang disabilitas yang bisa mengenyam pendidikan. Bahkan, di Filipina hanya 4% yang bisa mengenyam pendidikan (Thongkuay, 2009). Masih minimnya kesadaran ini utamanya terjadi di negara-negara yang masih berkembang dimana ASEAN sendiri didominasi oleh negara-negara berkembang tersebut.

Di Indonesia sendiri, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menjamin hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara

termasuk penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan. Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi sehingga bisa diartikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan.

Namun, dalam pelaksanaannya, ternyata partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan di Indonesia secara umum masih memprihatinkan. Persentase tingkat pendidikan kaum disabilitas di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2010, sebesar 59,8% dari jumlah total penyandang disabilitas di Indonesia sama sekali tidak mengenyam pendidikan ataupun tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Bahkan, dari 40,2% sisanya yang bersekolah, 70,52%-nya hanya bersekolah hingga tingkat dasar dan hanya 0,57% yang lulus sebagai Diploma 3 (D3) dan atau Sarjana (Marjuki, 2010). Data ini membuktikan bahwa pemenuhan pendidikan bagi kaum disabilitas di Indonesia harus mendapatkan perhatian khusus melihat realita yang ada tidak sejalan dengan aturan hukum yang dibuat.

Rendahnya persentase tingkat pendidikan penyandang disabilitas ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti masih minimnya fasilitas dan kesadaran masyarakat awam terhadap pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas. Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak orang yang menganggap anak-anak penyandang disabilitas tidak perlu bersekolah karena kekurangan yang mereka miliki.

Pendidikan inklusif yang dicanangkan pemerintah yang memberikan banyak kebebasan dalam belajar agar bisa mengakomodasi para penyandang disabilitas pun ternyata belum berperan maksimal. Pada pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat stigma negatif dari lingkungan sekitar terhadap pendidikan para penyandang disabilitas ini.

Peran dan Kinerja ADF dan Pemenuhan Hak-hak Dasar Kaum Penyandang Disabilitas

ASEAN Disability Forum (ADF) merupakan sebuah forum yang didirikan pada tahun 2010 di Jakarta yang terdiri atas pemerintah, para penyandang disabilitas, perwakilan masyarakat sipil, dan berbagai organisasi penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara. ADF berfungsi mengkoordinasikan aksi-aksi yang memperjuangkan pembentukan kebijakan-kebijakan terkait kebutuhan kaum penyandang disabilitas.

Tujuan didirikannya ADF ialah sebagai gerakan yang mendukung kaum disabilitas di kawasan ASEAN dengan berkolaborasi dengan pemerintahan negara-negara anggota ASEAN (ASEAN Disability Forum). ADF dalam menjalankan fungsinya berpatokan pada Deklarasi Bali yang membicarakan upaya pemenuhan hak-hak dasar kaum penyandang disabilitas. Oleh karena itu, terdapat suatu harapan bagi ADF untuk dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak kaum penyandang disabilitas.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, ADF banyak memfasilitasi pertemuan-pertemuan formal, seminar ataupun diskusi yang dilakukan dalam ruangan tertutup dengan konsep yang formal untuk membahas hak-hak para penyandang disabilitas (*Disabled Peoples' International-Asia Pacific/DPI-AP Region*).

Program-program ini kemudian terasa belum maksimal dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas lantaran sifatnya yang terkesan sangat kaku dan formal. Selain itu, program-program ini juga masih terbatas pada mekanisme *government to government* sehingga pencapaiannya pun masih terbatas pada *sharing* informasi, pengetahuan, dan diskusi-diskusi terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak-hak dasar kaum disabilitas di negara-negara ASEAN.

ADF belum pernah secara langsung menginisiasi suatu langkah strategis yang bersifat solutif yang bisa ditempuh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya.

Oleh karena itu, peran ADF sebagai lembaga koordinasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Deklarasi Bali sudah selayaknya direalisasikan dan dioptimalkan lebih baik daripada apa yang selama ini telah dilakukan. Dengan kemudahan untuk bisa bekerja sama dengan para *stakeholder* yang ada seperti pemerintah negara-negara anggota ASEAN, ADF sejatinya bisa lebih leluasa memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan segala wewenang yang dimilikinya, sekali lagi ADF

seharusnya mampu menjadi garda terdepan dalam mensukseskan Deklarasi Bali.

Optimalisasi Peran ADF

ASEAN sebagai suatu organisasi regional yang menjadi wadah interaksi antara negara-negara di Asia Tenggara tentu diharapkan mampu menjadi wadah yang efektif untuk mengorganisasikan negara-negara ini dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar dari kaum penyandang disabilitas. Sejatinya, sebagaimana yang dijabarkan dalam teori liberalisme institusional mengenai peran suatu institusi dalam memberikan serangkaian keuntungan bagi negara-negara anggotanya, ASEAN tidak hanya dapat berperan memfasilitasi pertemuan dan pertukaran antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tetapi lebih dari itu, harus juga mampu berkontribusi positif bagi pemenuhan hak-hak hidup seluruh masyarakat ASEAN termasuk para kaum penyandang disabilitas.

Namun, seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, pembentukan dan upaya pengaktifan ADF pun belum membuahkan dampak yang signifikan terhadap perbaikan taraf hidup kaum disabilitas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ADF masih cenderung mengarah kepada bentuk-bentuk kegiatan formal yang bertujuan agar mekanisme penyadaran akan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar kaum penyandang disabilitas berjalan dengan mekanisme *top-bottom* (*ASEAN Disability Forum*). Para *stakeholder* yang dipertemukan dalam wadah ADF untuk bersama-sama mendiskusikan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar kaum

penyandang disabilitas diharapkan akan menjadi agen-agen yang menurunkan nilai-nilai kesadaran ini kepada masyarakat di negaranya masing-masing.

Sayangnya, mekanisme *top-bottom* seperti ini tidak selalu berjalan lancar. Seringkali penyebaran nilai-nilai ini belum mampu disebarluaskan oleh *stakeholders* karena berbagai kendala salah satunya ialah pemerintahan yang cenderung masih fokus pada isu-isu dalam negeri yang dianggap lebih vital seperti masalah-masalah ekonomi dan kestabilan politik. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat nilai-nilai ini menyangkut nilai-nilai kemanusiaan sesungguhnya bersifat universal. Setiap kaum penyandang disabilitas berhak menikmati akses pendidikan yang memadai dan kurangnya upaya ADF dalam menginisiasi terlaksananya suatu langkah penyadaran yang efektif oleh negara-negara ASEAN juga turut berperan dalam rendahnya taraf pendidikan kaum disabilitas di negara-negara Asia Tenggara.

Oleh karena itu, dengan mengingat pentingnya pendidikan dalam menentukan masa depan penyandang disabilitas di Asia Tenggara dan dalam rangka merealisasikan misi ADF berupa peningkatan kesadaran masyarakat Asia Tenggara akan hak-hak dasar yang dimiliki kaum disabilitas, ADF dapat menginisiasi sebuah kegiatan yang secara efektif dan efisien mampu membangkitkan kesadaran masyarakat ASEAN akan pentingnya akses pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas di Asia Tenggara.

Kegiatan ini dapat berupa sebuah *campaign project* yang dapat dilaksanakan di masing-masing negara anggota ASEAN. Suatu *campaign project* dapat menjadi sarana yang sangat baik untuk menumbuhkan dukungan bagi pendidikan kaum disabilitas karena pada era globalisasi ini, kehadiran media informasi dan komunikasi seperti media-media sosial dapat dengan mudah dijadikan sarana untuk menyebarkan nilai-nilai yang diinginkan. Selain itu, kehadiran media-media ini juga membuat pelaksanaan suatu kampanye tidak lagi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Kampanye yang diinisiasi dan didukung ADF dapat mengambil *platform* tertentu misalnya *ADF Education Campaign for Disability People: Stand for Them*. Dengan perannya sebagai wadah berkumpulnya para *stakeholder* bersama masyarakat sipil dan kaum penyandang disabilitas itu sendiri, ADF dapat menginisiasi dan mendorong pemerintah negara-negara ASEAN untuk berani mengambil aksi penyadaran yang nyata guna mempropagandakan isu-isu disabilitas di antara masyarakat ASEAN dan meningkatkan kesadaran serta dukungan masyarakat akan pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas di negaranya masing-masing. Melalui kampanye *Stand for Them*, segenap elemen masyarakat diajak untuk turut memberikan *support*/dukungan bagi para penyandang disabilitas di negara masing-masing untuk mengakses dan melanjutkan studi hingga jenjang tertinggi.

1) Bentuk kampanye

Kampanye *Stand for Them* dapat dimulai dari pembuatan barang-barang *merchandise* seperti pin dan *sticker* berlogo ADF yang bertuliskan *tagline* dari kampanye ini seperti “*Stand with Me!*” dan “*Education is Equal!*”. *Tagline* ini menggambarkan seruan kaum penyandang disabilitas kepada seluruh masyarakat ASEAN bahwa akses pendidikan hingga level tertinggi merupakan salah satu hak dasar yang harus diterima oleh para penyandang disabilitas dan bahwa untuk mewujudkan hal ini, para penyandang disabilitas ini membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat ASEAN di negaranya masing-masing tanpa terkecuali.

Barang-barang *merchandise* ini dapat didistribusikan oleh pemerintah nasional negara-negara ASEAN dan dijual ke seluruh wilayah negaranya masing-masing dan untuk melaksanakan dan menyebarluaskan kampanye ini, setiap pembeli wajib meng-*upload* foto *selfie* atau *groupfie* mereka bersama *merchandise* yang telah dibeli di *facebook* dan *twitter* dengan menggunakan *hashtag* #*I'vestandwiththem* dan #*haveyou?*.

Dengan demikian, foto-foto ini bisa dilihat oleh seluruh *followers* dan teman dari para pembeli sehingga dengan semakin banyak orang yang meng-*upload* foto dengan menggunakan *hashtag* ini, semakin banyak pula orang yang tergerak untuk melakukan hal yang sama dan pesan-pesan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi pendidikan kaum disabilitas di Asia Tenggara dapat tersampaikan secara luas.

Di samping kampanye via media sosial, pemerintah juga dapat mengadakan *direct campaign* atau kampanye lapangan yang bersifat interaktif dan menarik. Kampanye ini bisa dikemas dalam bentuk olahraga bersama kaum penyandang disabilitas atau pentas seni yang menampilkan bakat-bakat kaum penyandang disabilitas agar lebih menarik perhatian masyarakat awam.

Kampanye juga bisa dilakukan melalui pemberian bantuan-bantuan sosial kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) atau yayasan-yayasan yang khusus menangani kaum disabilitas. Dalam kampanye ini, tokoh-tokoh daerah atau bahkan nasional yang peduli terhadap nasib para penyandang disabilitas juga dapat dihadirkan untuk memberikan orasi-orasi penyadaran terkait taraf pendidikan dan hak-hak kaum disabilitas. Pada intinya, segala bentuk kampanye lapangan ini dilaksanakan untuk lebih menyadarkan masyarakat ASEAN di negaranya masing-masing akan pentingnya pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas.

2) Mekanisme penjualan dan distribusi

Mekanisme penjualan dan distribusi *merchandise* dapat dimulai dari kerja sama antara beberapa elemen pemerintahan seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan institusi-institusi sejenis di masing-masing negara anggota ASEAN. Di sini, ADF sebagai tempat berkumpulnya para *stakeholder* negara-negara ASEAN dapat berperan sebagai wadah yang mendukung dan memonitori perkembangan kampanye ini melalui pelaksanaan diskusi dan *sharing* informasi terkait kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kampanye,

dampak yang telah dirasakan, dan saran atau usulan dari negara-negara lain. Dengan demikian, kegiatan kampanye *Stand for Them* dapat dijalankan secara berkala dan terdapat tindakan saling mendukung antara negara-negara anggota ASEAN.

3) Pengembangan Kegiatan

Apabila proses penjualan *merchandise* dan publikasi melalui *twitter* dan *facebook* telah berjalan lancar, kampanye dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni tahap pengembangan kegiatan. Tahap ini berisi kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemungkinan menurunnya antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam kampanye ini dan dapat didukung serta dipantau oleh ADF. Salah satu kegiatan yang dimaksud adalah penyelenggaraan lomba *selfie* via *twitter* dan *facebook* di mana akun-akun dengan foto terbaik akan mendapatkan *reward* tertentu dari ADF dan foto tersebut akan dipajang di *website* ADF untuk menginspirasi lebih banyak orang.

Contoh kegiatan lain yang masuk dalam tahap pengembangan adalah pelaksanaan konser amal di negara masing-masing yang bertemakan *Stand with Them* yang bermodalkan keuntungan penjualan *merchandise*. Konser ini dapat mengundang sejumlah seniman yang peduli terhadap pendidikan para penyandang disabilitas dan bisa juga menampilkan aksi-aksi dari para penyandang disabilitas sendiri. Keuntungan dari konser ini akan disumbangkan kembali bagi proses distribusi dan penjualan *merchandise* di masing-masing negara serta disumbangkan kepada para penyandang disabilitas secara langsung. Selain itu, demi

menjaga kelanjutan dari kampanye *Stand with Them*, ADF juga dapat menyediakan sarana-sarana penunjang seperti *website* khusus kampanye *Stand for Them* yang diisi dengan informasi-informasi seputar kampanye ini seperti deskripsi singkat mengenai kampanye *Stand for Them*, perkembangan kampanye di ke-10 negara anggota ASEAN, informasi penjualan *merchandise* secara *online*, dan beberapa foto-foto pilihan ber-*hashtag* *#I'vestandwiththem* yang dianggap menarik.

Pada intinya, kegiatan ini harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan serta senantiasa dimonitori melalui ADF sehingga harapannya, dengan semakin banyak jumlah *merchandise* yang terjual serta *hashtag-hashtag* *#I'vestandwiththem* dan *#haveyou?* di media sosial, masyarakat ASEAN dapat semakin sadar bahwa pendidikan hingga level tertinggi merupakan hak-hak dasar kaum penyandang disabilitas yang dalam proses pemenuhannya, memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat ASEAN. Dengan segala kekhususan yang dimiliki para penyandang disabilitas, mereka pun mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara masing-masing serta bagi kawasan Asia Tenggara.

KESIMPULAN

Poin-poin kesepakatan dalam *Bali Declaration on The Enhancement of The Role and Participation of The Persons with Disabilities in ASEAN Community* yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN harus dilaksanakan secara optimal oleh negara-negara tersebut termasuk dalam hal komitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dasar kaum penyandang disabilitas.

Di Indonesia sendiri, kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas ini masih sangat rendah utamanya dalam hal pendidikan. *Mindset* yang menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak perlu mendapatkan pendidikan yang sama seperti individu lainnya tentu harus diubah melalui suatu tindakan penyadaran kepada masyarakat secara keseluruhan.

ASEAN Disability Forum (ADF) dengan wewenang yang dimilikinya sebagai salah satu lembaga yang dibentuk ASEAN untuk memperjuangkan hak-hak kaum penyandang disabilitas harus mampu mengambil peran dalam gerakan penyadaran masyarakat. Bentuk-bentuk penyadaran tersebut haruslah melalui metode-metode menarik dan menyasar ke seluruh lapisan masyarakat.

Gerakan penyadaran yang ditawarkan adalah gerakan *StandforThem*, yaitu sebuah gerakan penyadaran terhadap masyarakat luas untuk bersama-sama mendukung para penyandang disabilitas di Indonesia untuk mengenyam pendidikan

hingga level perguruan tinggi. Gerakan ini akan menjadi gerakan awal dari gerakan berkesinambungan nantinya.

Pencapaian poin-poin kesepakatan dalam Deklarasi Bali membutuhkan sinergi antara negara-negara anggota ASEAN dengan lembaga-lembaga lainnya. Kerja sama ini bisa dikoordinasikan oleh ADF sebagai lembaga yang memang membidangi hak-hak penyandang disabilitas. Di Indonesia misalnya, ADF harus dapat bekerja sama dengan para *stakeholder* di Indonesia dalam hal ini Pemerintah Indonesia. Idealnya gerakan penyadaran terhadap masyarakat luas berupa kampanye *Stand for Them* ini haruslah dilaksanakan secara terus menerus agar mampu mencapai tujuannya. Gerakan yang berkesinambungan ini juga harus bersinergi dengan pihak-pihak terkait agar diperoleh hasil yang maksimal.

Daftar Pustaka

- ASEAN. 2011. *Bali Declaration*. Jakarta: Sekretariat ASEAN.
- ASEAN. 2012. *ASEAN Selayang Pandang , Edisi Ke-20, Tahun 2012*. Jakarta: Dirjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Indonesia.
- ASEAN Disability Forum. *About ADF* [Online]. ASEAN Disability Forum: <http://aseandisabilityforum.org/> [11 April 2017].

DPI-AP. *Calender 2015* [Online]. Disabled Peoples' International Asia Pacific Region: <http://www.dpiap.org/calendar/> [11 April 2017].

Heywood, A. 2007. *Politics*. New York: Palgrave Macmillan.

Jackson, R., & Sorensen, G. .2010. *Introductions to International Relations, Theories and Approach*. New York: Oxford University Press.

Lamy, S. L. 2008. *Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neo-liberalism*. Dalam J. Baylis, S. Smith, & P. Owens, *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.

Marjuki. 2010. *Penyandang disabilitas berdasarkan klasifikasi ICF*. Jakarta : Kemensos RI.

Pikiran Rakyat. 2010. *33.000 Anak Penyandang Disabilitas Belum Nikmati Pendidikan* [Online]. Pikiran Rakyat Online: <http://www.pikiran-rakyat.com> [11 April 2017].

Shapcott, R. 2008. *International Ethics*. Dalam J. Baylis, S. Smith, & P. Owens, *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.

Sorensen, G. 2006. *Liberalism of Restraint and Liberalism of Imposition: Liberal Values World Order in the New Millennium*.

Thongkuay, S. 2009. *Rights of Persons with Disabilities in the Asia Pacific* [Online]. Asia Pacific Human Rights Information Center: <http://www.hurights.or.jp/> [11 April 2017]

UN Economic and Security Council. 2012. *Mainstreaming Disability in The Development Agenda: Towards 2015 and Beyond*. New York: United Nations.

Wulansari, R. 2014. *ASEAN Disability Forum (ADF) 2015 di Myanmar* [Online]. Perspektif Online: <http://www.perspektif.net> [11 April 2017]

**HUBUNGAN INTERNASIONAL TENTANG KERJASAMA
KEMANUSIAAN NEGARA UTARA DAN NEGARA SELATAN
(AUSTRALIA DAN INDONESIA)**

Yeyen Subandi

Abstract

The southern states can be regarded as a developing country views of the average income is low, infrastructure that can be said is still relatively underdeveloped, and also the human development index which is less than the northern countries as the developed countries. Here the exception of Australia and New Zealand, despite being located in the southern part, but both countries have been classified into developed countries. Relation to humanitarian cooperation between Australia and Indonesia has been going on for a long time, and this partnership is experiencing bright and dim influenced by the political situation and international relations between the two countries. Leadership change affect the existing cooperation, because both countries still need each other in bilateral relations, although sometimes intervention. The purpose of this study was to see whether the assistance provided by Australia solely for humanitarian or any other purpose. In this article will use qualitative methods and results can be informed or to sharing for students, non-governmental organizations (NGO) and government who have been getting foreign aid from Australia in humanitarian issues, until now the Indonesian government still expect and rely on the Australian government about assistance or cooperation in humanitarian issues.

Key Words: *Developed Countries, Developing Countries, Cooperation, Humanitarian, Foreign Assistance.*

Latar Belakang

Hubungan Internasional (HI) dan kemanusiaan dewasa ini, mengapa muncul banyak persoalan baru secara bersamaan karena kepentingan demi kemanusiaan, apakah hanya pergeseran mengenai isu kemanusiaan saja? Mampukah teori-teori yang telah ada saat ini menjelaskan perubahan-perubahan yang begitu cepat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering muncul. Pola hubungan baru tersebut mengharuskan peninjauan kembali atas berbagai teori dalam disiplin ilmu ini.

Untuk memenuhi tuntutan perubahan jaman sebagai suatu disiplin, Ilmu HI dapat dikatakan sebagai “pendatang baru” setelah ilmu-ilmu humaniora yang lain (politik, hukum, ekonomi, sosiologi) berkembang dengan paradigmanya masing-masing. Keterlambatan perkembangan HI sebagai suatu ilmu tidak lepas dari asal-usul kelahiran ilmu ini, yang baru muncul pada pasca Perang Dunia ke II. Selama beberapa saat, setelah itu HI masih didominasi oleh ilmu politik, yang kemudian dapat dianggap sebagai “induk” Ilmu HI. Dominasi ini membawa konsekuensi epistemologis bagi HI, seperti masih dipertanyakannya apakah HI itu dapat dianggap ilmu.

HI pada masa lampau berfokus pada kajian mengenai perang dan damai, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antara bangsa dalam konteks sistem global tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim (*high politics*). HI kontemporer selain mengkaji hubungan politik juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependensi perekonomian, hak-hak asasi manusia, kemanusiaan, organisasi-organisasi dan lembaga swadaya

masyarakat (LSM) internasional dan lain sebagainya. Pola interaksi HI tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional baik oleh pelaku negara-negara (*state actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*).

Sejak akhir Perang Dingin, disiplin keilmuan HI banyak tantangan untuk menelusuri ribuan cabang dari proses yang jika sebelumnya disamarkan dalam bentuk-bentuk kekhawatiran yang berlebihan terhadap konflik negara adikuasa dan perang nuklir yang sebenarnya berakibat/dampaknya kepada manusia dan kemanusiaan. Pada era sekarang ini sudah membuka diri dengan meruntuhkan batas-batas nasional dalam ruang politik, ekonomi dan sosial. Dan sudah banyak tulisan-tulisan tentang fenomena globalisasi kemanusiaan baik di negara Selatan, Utara maupun di belahan dunia lain.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai HI dalam isu kemanusiaan di negara Selatan yaitu Australia dan Indonesia. Negara bagian Selatan bisa dikatakan sebagai negara berkembang dilihat dari rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang masih dikatakan relatif terbelakang dan juga indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan negara Utara sebagai negara maju. Di sini adanya pengecualian untuk Australia dan Selandia Baru, meskipun berada di bagian Selatan letaknya, tapi kedua negara tersebut sudah tergolong ke dalam negara maju.

Pembahasan

Hubungan Internasional dan Kemanusiaan

Hubungan antara negara maju yang dikategorikan sebagai negara Utara, dan negara berkembang yang dikategorikan sebagai negara Selatan, bila dilihat dari hubungan di bidang ekonomi ke dua negara tersebut melakukan hubungan kerjasama yang biasanya negara Utara akan menanamkan modalnya ke negara Selatan dan untungnya dibagi ke dua belah pihak. Begitupula kerjasama dilakukan untuk bidang teknologi, sosial, politik dan kemanusiaan.

Australia berada di bagian Selatan tetapi tergolong negara maju, dan ini merupakan sebuah pengecualian, kerjasama dengan Indonesia sudah dilakukan sejak lama. Kerjasama antara Australia dan Indonesia sudah terjadi dan bisa dilihat dari jaman pra sejarah, di mana Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat. Hubungan antara kedua negara ini mempunyai sejarah yang panjang dengan contoh persamaan antara hewan dan tanaman yang ada di Australia, Irian Jaya, Nusa Tenggara dan Sulawesi yang merupakan bukti adanya hubungan tersebut dan juga terdapat hubungan sosial dan budaya. Cerita mengenai hubungan ini sudah lama dimulai dalam sejarah manusia, tetapi sulit untuk mengatakan kapan tepatnya hubungan/kerjasama antara Australia dan Indonesia itu dimulai.

Sepertinya di dalam studi HI yang mendekati ke arah isu tersebut adalah menyangkut kemanusiaan, yaitu teori kosmopolitanisme, di mana teori ini merupakan sebuah proyek perealisasiannya suatu dunia yang kosmopolitan dengan basis

kesetaraan dan menyarankan bagaimana tatanan sosial dan internasional dirancang sesuai prinsip tidak melakukan, atau meminimalkan hal-hal yang membahayakan baik itu secara sengaja atau tidak sengaja pihak lain, yaitu manusia dan juga kemanusiaan termasuk juga didalamnya orang-orang asing. Dengan teori kosmopolitan ini kerjasama untuk kemanusiaan bisa dirancang lebih luas lagi dan menjadi acuan bagi penggiat-penggiat isu kemanusiaan baik itu aktor negara maupun non-negara.

Pemikiran-pemikiran HI dan kemanusiaan bukan hanya tumbuh dalam pemikir-pemikir Barat saja, tetapi pemikir non-Barat pun tumbuh dan berkembang seperti apa yang dilontarkan oleh Sayyid Qutb tentang kedaulatan dan kemanusiaan, dimana pemikiran tentang kedaulatan itu dikonstitusikan.

Dalam hal ini mengenai kemanusiaan masih juga berkiblat kepada Barat atau pendukung historisisme eropasentris yang dihasilkan membentuk semua kasus perbedaan pembangunan sebagai keganjilan, deviasi atau anomali, yang konsekuensinya tereduksi menjadi model rasionalitas dan peradaban yang anterior diakronis dan normatif inferior.

Penulis akan mencoba mengkaitkan mengenai perdebatan tentang kemanusiaan di dalam HI dan akan mengambil dari pemikiran/pandangan, yaitu: Pertama, pandangan menurut Antonio Doni dalam perdebatan mengenai kemanusiaan. Menurut Antonio Doni, kemanusiaan tidak lagi diproyeksikan sebagai gerakan moral saja, tetapi bergeser menjadi isu dalam HI. Kemanusiaan kemudian berkonotasi menjadi tiga bagian terpisah, tetapi tumpang tindih realitas: sebuah ideologi, gerakan dan profesi

(Finkelstein, 1995: 369). Mencoba menanggapi dari apa yang sudah dituliskan oleh Antonio Doni, memang semuanya berawal dari manusia dan kemanusiaan dan juga dari manusia itu sendiri, dengan adanya keinginan atau kepentingan yang ingin dicapai entah itu impian maupun cita-cita dari seorang manusia itu sendiri.

Yang kedua, Menurut Michael N. Barnett, "*Empire of Humanity*" mengeksplorasi kemanusiaan itu pertumbuhan yang luar biasa dari asal mulanya pada awal abad kesembilan belas menjadi terkenal saat dalam kehidupan global (Barnett, 2011). Berdasarkan pekerjaan yang luas, pertemuan dekat dengan banyak pihak terkemuka seperti lembaga internasional dan wawancara dengan puluhan pekerja bantuan di lapangan dan di kantor pusat, *Empire of Humanity* memberikan sejarah yang bersifat global dan intim. Menghindari baik romantisme dan sinisme, *Empire of Humanity* mengeksplorasi humanitarianisme bertahan baik itu tema, tren, dan yang paling mencolok, ambiguitas etis. Kemanusiaan berharap untuk mengubah dunia, tapi dunia telah meninggalkan jejak pada kemanusiaan.

Kemanusiaan telah mengalami tiga zaman yang berbeda, duni kekaisaran, post-kolonial, dan liberal yang masing-masing telah membentuk apa yang kemanusiaan dapat lakukan dan apa itu. Dunia telah menghasilkan bukan hanya satu kemanusiaan, melainkan varietas kemanusiaan. Selanjutnya, Barnett mengamati bahwa dunia kemanusiaan terbagi antara sebuah kamp darurat yang ingin menyelamatkan nyawa dan tidak ada lagi dan sebuah kamp alkemis yang ingin menghilangkan penyebab penderitaan.

Kamp ini menawarkan visi yang berbeda tentang apa tujuan dan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan sesuai merespon secara berbeda terhadap tantangan global yang sama dan keadaan darurat kemanusiaan. Kemanusiaan telah mengembangkan metropolis lembaga-lembaga global perawatan, sebesar pemerintahan global kemanusiaan. Pemerintahan itu sendiri adalah kemanusiaan, Barnett mengamati, adalah sebuah kerajaan kemanusiaan: ia melatih kekuasaan atas individu sangat berharap untuk membebaskan, *“enhanced opportunity, increase equity, peace and security and a sustainable future”*.

Kerjasama Dalam Isu Kemanusiaan Antara Australia dan Indonesia

Setelah melihat apa yang dikatakan oleh Antonio Doni dan Michael N Barnett pada bagian sebelumnya, penulis akan mengkaitkan dari dua pemikiran tersebut dengan kasus hubungan/kemitraan/kerjasama antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia di dalam studi Hubungan Internasional untuk kemanusiaan secara luas. Muncul juga dalam pikiran-pikiran awam apakah Australia memberikan bantuan semata-mata untuk kemanusiaan? Atau ada intervensi di antara dua negara yang saling bekerjasama tersebut?

Pada dasarnya penulis setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Antonio Doni dan Michael N Barnett, yang mana pada dasarnya semua di balik itu, kalau kita lihat kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia adalah bukan hanya kepentingan kemanusiaan semata, tetapi adanya kepentingan dari

dua negara tersebut di dalam melakukan hubungan internasional baik kepentingan politik ataupun kepentingan mencari suaka (Barnett, 2011). Dengan hal seperti itu, penulis memberikan asumsi dengan menggunakan asumsi mangkok di banding asumsi pagar tinggi, dengan kata lain pemerintah Australia sebanyak-banyaknya memberikan bantuan/anggaran untuk isu kemanusiaan yang ada di Indonesia dengan tujuan mendapatkan suaka. Begitu pula dengan pemerintah Indonesia dengan menggunakan asumsi mangkok tersebut dibandingkan dengan menggunakan asumsi pagar tinggi, lebih ke arah menerima atau mendapatkan bantuan dari Australia dan tidak membuat batas atau pagar tinggi tetentu untuk hubungan bilateral dari ke dua negara.

Bantuan luar negeri ataupun kerjasama Australia yang sudah diberikan ke Indonesia memiliki motif-motif yang berbeda. Pemerintah Indonesia sendiri menanggapi perihal kerjasama baik itu isu kemanusiaan atau isu lainnnya, dengan kata lain apakah selama ini kerjasama dibuat untuk dilakukan, atau kerjasama dibuat untuk tidak dilakukan, dan atau kerjasama dibuat untuk melanggengkan *status quo*, semua tergantung kepada pemikiran pemerintah Indonesia mengenai kerjasama ini.

Menanggapi adanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul, penulis coba mengkaitkan dengan prinsip-prinsip diplomasi kemanusiaan di dalam Hubungan Internasional ke dua negara tersebut, baik yang dilakukan oleh Australia maupun melalui *International Non Governmental Organization* (INGO) pemerintah Australia di dalam menyalurkan bantuan atau kerjasamanya,

selama ini apakah bantuan yang telah diberikan sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam diplomasi kemanusiaan, seperti *humanity*, *netrality* maupun *imparsiality*. Begitu pula sebaliknya apakah pemerintah Indonesia sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Yang terjadi, terkadang pemerintah Australia sedikit melenceng dari prinsip-prinsip diplomasi kemanusiaan dalam menyalurkan bantuannya, seperti contoh: apa yang sudah diberikan (bantuan) melalui INGO Australia di dalam penyalurannya ataupun secara langsung dari pemerintah Australia, dalam implementasinya tidak melihat kebutuhan atau apa yang diperlukan oleh suara akar rumput, karena sudah ada aturan (petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis)) dari pemerintah Australia, dan sebagai warga Negara Indonesia (WNI) harus pandai-pandai melihat dan mengamati kerjasama melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) yang di dalam kerjasama yang terjadi adalah *Memorandum of Agreement* (MoA). Kekurangan yang ada untuk pemerintah Indonesia sendiri ataupun LSM lokal belum terlalu transparansi dalam melakukan prinsip akuntabilitas.

Pertentangan/pro dan kontra pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenai hukuman mati bagi warga negara Australia dalam kasus narkoba berdampak besar pada bantuan yang selama ini dikerjasamakan dan juga menyebabkan hubungan yang memanas. Australia yang berharap tidak adanya hukuman mati bagi warga negaranya dengan alasan selama ini pemerintah Australia sudah banyak membantu pemerintah Indonesia. Namun, pada kenyataannya tetap adanya

atau dilakukannya eksekusi mati bagi warga negara Australia. Kebijakan dari pemerintah Indonesia inilah yang menimbulkan perdebatan baik di negara Selatan maupun di negara Utara bahkan di dunia. Menurut *The Independent Commission on International Humanitarian Issues; Humanitarian is a basic orientation towards the interest and welfare of people* (The Report of The Independent Commission on International Humanitarian Issues, The Winning Human Race).

. Ini menegaskan bahwa humanitarianisme memang berfokus kepada kepentingan dan kesejahteraan manusia, tetapi semua kepentingan atau kesejahteraan tersebut tergantung juga kepada pimpinan/kepala dari pemerintahan yang berkuasa. Menurut komisi ini, humanitarianisme itu merupakan sebuah kerangka untuk mengenali dilema yang ada dalam pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan manusia dan juga menjadi formula untuk menyelesaikan dilema tersebut. Humanitarianisme juga dilihat sebagai perilaku individual dan sebuah kerangka untuk para *policy makers* (The Report of The Independent Commission on International Humanitarian Issues, The Winning Human Race).

Mengacu pada pemikiran Grotius berpendapat bahwa kekerabatan antara manusia dibentuk oleh alam, yang mengarah ke komunitas hak. Ini memperpanjang ikatan antar bangsa serta antara masyarakat lokal. Sebuah ikatan seperti ini antara berbagai jenis masyarakat manusia membentuk hukum alam, berasal dari kaidah-kaidah penalaran yang benar. Jadi untuk Grotius, hukum universal dapat didasarkan pada sifat manusia sebagai makhluk rasional. Sama halnya pemikiran Vattel mengenai kekuasaan partai

yang ada dan menang dalam pemilihan umum (pemilu), untuk Grotius mengarah ke komunitas hak yang alih-alih kalau dilogikakan partai adalah komunitas dan menentukan kepentingan dan haknya masing-masing. Begitupula di Australia partai mana yang memenangkan pemilu maka partai tersebut juga sebagai pemegang kekuasaan anggaran untuk diberikan/didistribusikan berapa banyak ke negara yang akan ditunjuk mendapatkan bantuan tersebut dengan kata lain negara yang bekerjasama.

Kalau mengacu pada kosmopolitan dengan tujuan nilai *global governance* untuk studi kasus kerjasama antara Australia dan Indonesia, mencoba mengacu pada pemikiran Finkelstein dimana dengan menggunakan teori kosmopolitan dengan tujuan *global governance* adalah memerintah (*governing*), tanpa otoritas kedaulatan, hubungan yang melampaui batas-batas nasional (Finkelstein, 1995: 369).

Dapat dikatakan bahwa *global governance* merupakan bentuk pemerintahan internasional yang tidak otoriter. Dalam memandang hal tersebut Finkelstein mengkaitkannya dengan rezim-rezim internasional. Dalam konteks ini, rezim internasional sekaligus mengadopsi nilai-nilai kosmopolitan yang cenderung mengedepankan nilai dan kepentingan kemanusiaan. Isu-isu spesifik yang diangkat atas dasar kepentingan keberlangsungan hidup manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Mengacu kepada pemikiran Finkelstein di dalam kosmopolitan dengan tujuan dan nilai *global governance* yang dilakukan oleh Australia, ini menandakan hubungan antara Australia dan Indonesia tanpa otoritas kedaulatan melalui

penunjukan semata-mata adanya peran Australia, tetapi secara tidak langsung mengenai bantuan/anggaran tetap dari pemerintah Australia dengan mengedepankan isu kemanusiaan melalui *Non Governmental Organization* (NGO) yang ditunjuk.

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Australia di dalam kerjasama dengan Indonesia pada awalnya atas nama kemanusiaan, tetapi kalau melihat dari perdebatan kemanusiaan dalam Hubungan Internasional, perdebatan kemanusiaan serta kerjasama yang sudah dijalin atau dilakukan, dengan mengambil contoh kasus dan pergeseran isu kemanusiaan tetap adanya intervensi yang dilakukan di antara ke dua negara tersebut, terutama intervensi dari negara yang memberikan bantuan/memberikan donor keuangan, intervensi yang dilakukan bisa terlihat atau tidak terlihat dan juga intervensi sering atau banyak ataupun tidak sering dan tidak banyak dilakukan.

Dalam perdebatan kemanusiaan untuk kasus kemitraan/kerja sama antara Australia dan Indonesia dengan mengacu kepada pemikiran Antonio Doni dan Michael N Barnett, tetapi untuk isu pergeseran kemanusiaan itu sendiri akan lebih mengacu kepada pemikiran-pemikiran dari *natural law*, *modern state* dan kosmopolitan, dan pemikiran-pemikiran yang dituliskan di atas masih mengacu pada hubungan internasional dan pemikiran Barat.

Kedua negara tersebut saling membutuhkan, walaupun sudah seringnya pergantian kepemimpinan dari kedua negara tersebut dan juga terkadang memanas di dalam hubungannya.

Mengutip dari pemikiran Michael N. Barnett bahwa “dunia kemanusiaan terbagi antara sebuah kamp darurat yang ingin menyelamatkan nyawa dan tidak ada lagi dan sebuah kamp alkemis yang ingin menghilangkan penyebab penderitaan” dari pernyataan di atas apakah Australia berkomitmen untuk menyelamatkan manusia bekerjasama dengan Indonesia hanya semata-mata karena kemanusiaan, atau demi kepentingan negaranya (Barnett, 2011).

Bantuan luar negeri sebenarnya memiliki syarat-syarat bilamana aliran modal dari luar negeri itu dikatakan sebagai bantuan, antara lain; yaitu aliran dananya tidak memiliki inisiatif keuntungan atau unsur komersial dan juga dana yang diberikan memiliki syarat dan ketentuan yang lebih ringan dan mudah daripada yang berlaku pada umumnya. Bantuan luar negeri sendiri bisa berbentuk pemberian modal. Bantuan luar negeri yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia sebenarnya ada syarat-syarat, tetapi terkadang kurang dipublikasikan ke masyarakat luas dan juga LSM yang mendapatkan bantuan atau pemerintah pusat dan daerah kurang memahami hal tersebut.

Penulis coba membandingkan kerjasama yang sudah dilakukan oleh Australia dengan Indonesia dengan tulisan dari Alan Rix yang menjelaskan tentang bantuan luar negeri atau kerjasama suatu negara, dimana suatu negara memberikan bantuan ke negara lain dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan ataupun masalah lainnya, disebabkan suatu negara yang menerima bantuan tersebut mengalami bencana dan sebagainya ini yang disebut dengan motif kemanusiaan atau

semata-mata karena atau untuk kemanusiaan, tetapi ada juga motif politik, dimana suatu negara memberikan bantuan ke negara lain karena adanya alasan politis tertentu, dengan kata lain adanya maksud lain dari pemberian bantuan tersebut yang menimbulkan keterikatan atau menciptakan suatu kondisi negara penerima donor/bantuan pada masa mendatang harus melakukan sesuatu dengan kata lain sebagai balas budi kepada negara pemberi/pendonor. Selain kedua motif yang dijelaskan sebelumnya, ada juga motif keamanan nasional, dimana suatu negara memberikan bantuan luar negeri memiliki asumsi bahwa dengan memberikan bantuan luar negeri akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong stabilitas politik yang ada. Tulisan dari Alan Rix sudah menggambarkan bahwa Australia sebagai negara pendonor mempunyai kekuasaan dan juga menanamkan intervensi kepada negara penerima donor yaitu Indonesia, motif-motif yang sudah dijelaskan oleh Alan Rix benar apa adanya dan dikuatkan oleh bukti-bukti yang ada bahwa Australia memberikan bantuan kepada Indonesia bukan hanya motif kemanusiaan, tetapi ada motif lain.

Selain penjelasan-penjelasan dan analisa di atas, penulis mencoba mengkaitkan mengenai perdebatan kemanusiaan untuk isu kemanusiaan yang dikerjasamakan antara Australia dan Indonesia, dengan mengutip dari pemikiran humanisme dalam pengertian *Ethical Humanism* yang mengacu kepada sebuah gerakan kemanusiaan yang secara luas memiliki perhatian khusus kepada perikemanusiaan, yang memperjuangkan kaum minoritas, sebagaimana uraian berikut: humanisme tersebut menempatkan

diri sebagai satu pemikiran etis yang mempromosikan harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang dalam perkembangannya telah menjadikan manusia sadar akan eksistensinya sebagai makhluk rohani, yang sekaligus juga menandakan kembali tanggung jawabnya dalam kehidupan di dunia. Akibat pandangannya tentang manusia yang cukup optimis, humanisme telah berjasa mengembalikan harkat dan martabat manusia, menyadarkan potensinya dan menegaskan tanggung jawabnya dalam kehidupan. Manusia dalam pandangan humanistik adalah ukuran segala sesuatu.

Dengan pemikiran yang diutarakan dari *Ethical Humanism* dapat digarisbawahi bahwa “manusia sadar akan eksistensinya sebagai makhluk rohani” ini menunjukkan adanya pemikiran hukum alam (*natural law*), tidak ada teori moral yang tidak didasarkan pada bentuk yang sangat spesifik teologi Aristoteles bisa dianggap sebagai pandangan hukum alam. Mungkin berpikir bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk memulai pembahasan teori hukum kodrat dalam etika selain menetapkan makna untuk “teori hukum alam” dan melanjutkan dari sana. Tapi ada cara yang lebih baik melanjutkan, salah satu yang mengambil sebagai titik awal peran sentral bahwa teori moral Thomas Aquinas bermain dalam tradisi hukum alam. Jika ada teori moral adalah teori hukum alam, itu adalah Aquinas (setiap etika antologi pengantar yang mencakup materi teori hukum alam). Untuk Aquinas, ada dua fitur kunci dari hukum alam, memiliki pengakuan yang struktur pembahasannya tentang hukum alam.

Yang pertama adalah bahwa, ketika kita fokus pada peran Allah sebagai pemberi hukum alam, hukum alam hanyalah salah satu aspek ilahi, dan sebagainya teori hukum alam dari perspektif bahwa hanya satu bagian antara lain dari teori ilahi.

Yang kedua adalah bahwa, ketika kita fokus pada peran manusia sebagai penerima hukum alam, hukum alam merupakan prinsip-prinsip rasionalitas praktis, prinsip-prinsip dimana tindakan manusia yang akan dinilai sebagai masuk akal atau tidak masuk akal, dan sebagainya teori alam hukum dari perspektif bahwa bagian unggul dari teori rasionalitas praktis.

Dengan itu mengenai perdebatan kemanusiaan, pada dasarnya untuk kemanusiaan/perikemanusiaan tetapi untuk perdebatan ini dalam kasus kemitraan kerja sama antara Australia dan Indonesia bisa dilihat dari pemikiran *modern-state* apakah ada intervensi dari Australia terhadap Indonesia, atau tidak ada. Dilihat dari pemikiran *modern state* sudah jelas juga adanya intervensi yang terjadi dari negara pendonor kepada negara penerima donor dengan merujuk pada pemikiran *modern-state*.

Perdebatan kemanusiaan dan Hubungan Internasional terlihat dalam salah satu teorinya, yaitu teori Kritis (*critical theory*). Hubungan Internasional berkembang juga merupakan proyek kosmopolitan. Proyek ini berusaha meneorisasikan dan mengidentifikasi kemungkinan perealisasi suatu tuntutan dunia yang kosmopolitan termasuk didalamnya tentang kerjasama kemanusiaan. Dan masyarakat dunia menganggap semua orang (sebagai individu) diperlakukan setara dan memiliki hak dan status moral yang sama juga, sehingga semua hal dapat diakui dan

direalisasikan. Kosmopolitan mempromosikan nilai kesetaraan moral secara universal, dialog universal, serta demokrasi dan keadilan.

Selain perdebatan-perdebatan tentang kemanusiaan, penulis mengangkat juga mengenai perdebatan teori tentang bantuan luar negeri. Di dalam pemberian bantuan luar negeri dari Australia dan Indonesia atau kerjasama yang dilakukan tersebut, ada beberapa teori mengenai bantuan luar negeri, antara lain:

Pertama, aliran realis mengatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan komponen penting bagi kebijakan keamanan internasional. Suatu negara memberikan bantuan luar negeri bukan bertujuan untuk kemanusiaan, melainkan untuk proyeksi *power* negara si pendonor.

Kedua, teori ketergantungan mengatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan alat untuk melakukan ekspansi ke negara-negara miskin untuk mengeksploitasi sumber daya, bantuan luar negeri dianggap sebagai sistim yang mengekalkan ketergantungan.

Ketiga, aliran moralis/idealis mengatakan bahwa bantuan luar negeri suatu negara secara esensial merupakan gerakan kemanusiaan tanpa ada maksud dan tujuan tertentu dibelakangnya. Menurut aliran ini negara kaya memiliki tanggung jawab moral untuk membantu negara miskin sekaligus mendorong dukungan yang saling menguntungkan yang sejalan dengan pembangunan ekonomi, politik, hukum, sosial dan hak asasi manusia (HAM).

Terakhir, teori *bureaucratic incrementalist* mengatakan bahwa bantuan luar negeri yang diberikan oleh suatu negara memiliki

kombinasi/bermacam-macam maksud dan tujuan, selain tujuan isu kemanusiaan ada juga tujuan geopolitik, ideologi, kepentingan komersial dan berbagai faktor dalam politik domestik negara pendonor.

Dari teori yang sudah dijelaskan di atas, bantuan luar negeri dari Australia ke Indonesia ataupun kerjasama yang sudah dilakukan bukan hanya motif kemanusiaan saja, tetapi ada maksud lain di antara negara pemberi donor dan penerima donor, dan kedua negara tersebut saling ketergantungan dan menguntungkan walaupun yang terkadang situasi politik memanas.

Dari perdebatan-perdebatan teori di atas, penulis mengacu pada hubungan antara Australia dan Indonesia dalam isu kemanusiaan yang masuk ke dalam kategori teori pertama, yaitu teori realis, teori kedua yaitu teori ketergantungan dan teori keempat yaitu teori *bureaucratic incrementalis* dengan tujuan-tujuan tertentu dari Australia, selain teori-teori tentang bantuan luar negeri yang sudah disebutkan, jelaskan dan analisa, ada juga dasar/motif kemanusiaan di dalam menyalurkan bantuan dan juga ada motif politis dan *power* dari negara pendonor, yaitu Australia, karena selain memberikan/mendonorkan bantuannya kepada Indonesia, Australia juga memberikan bantuan melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam isu kemanusiaan untuk negara-negara yang membutuhkan.

Pada tahun 2016 apakah Australia masih menyalurkan bantuan luar negeri ataupun bekerjasama untuk isu kemanusiaan ataupun isu lainnya kepada Indonesia, karena pada 1 Januari

2016 juga akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) termasuk Indonesia yang berada di negara bagian selatan. Karena kalau mengacu pada pemikiran pandangan Asia dan Australia (ASLIA) dari Tan Malaka dimana menurutnya ASLIA adalah sebuah gagasan atau visi tentang federasi atau perserikatan sosialis dari semua negara yang terletak di antara Asia dan Australia, di mana didalamnya ada pembagian Australia Utara dan Asia. Tan Malaka di dalam pemikirannya, Indonesia dan Australia itu bersatu.

Kesimpulan

Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Australia dan Indonesia di dalam kerjasama kemanusiaan yang pada awalnya mengatasnamakan kepentingan kemanusiaan, tetapi berkelanjutannya dengan isu pergeseran kemanusiaan dengan adanya intervensi. Dengan itu kita bisa melihat dari teori-teori perdebatan kemanusiaan di dalam Hubungan Internasional dan pergeseran kemanusiaan dari *natural law*, *modern-state* dan kosmopolitan dengan tujuan dan nilai *global governance*.

Untuk perihal kerjasama yang dilakukan dalam program/isu untuk kemanusiaan, Australia tergantung juga kepada partai yang mendominasi dan memenangi pemilu seberapa besar bantuan yang akan diberikan dan kepada negara mana saja akan dikerjasamakan. Kalau melihat sejarah kerjasama yang sudah dilakukan antara Australia dan Indonesia dari jaman pra-sejarah, Orde Lama, Orde Baru dan jaman Reformasi sudah terlihat adanya intervensi yang dilakukan dari kerjasama di antara ke dua negara tersebut.

Di dalam kerjasama ini (kerjasama untuk kemanusiaan) juga masih adanya kontroversi dan perdebatan serta perbedaan visi dan misi, apakah untuk kemanusiaan yang tanpa dibumbui oleh segi politis dengan kata lain hanya dan untuk kemanusiaan. Kemanusiaan tidak lagi diproyeksikan sebagai gerakan moral saja tetapi bergeser menjadi isu dalam Hubungan Internasional. Kemanusiaan kemudian berkonotasi menjadi tiga bagian terpisah, tetapi tumpang tindih realitas: sebuah ideologi, gerakan dan profesi. Tetapi kita harus tetap optimistis bahwa kemanusiaan sangat berperan di dalam Hubungan Internasional, walaupun isu kemanusiaan sampai saat ini masih menjadi tujuan utama politik suatu manusia dan negara.

Sudah jelas apa yang dilakukan oleh Australia yang masuk ke dalam kategori negara maju walaupun berada di negara bagian Selatan mempunyai kepentingan-kepentingan untuk dilakukan bersama “kerjasama” dengan negara selatan lainnya salah satunya Indonesia.

Ada beberapa motif negara dalam memberikan bantuan, termasuk didalamnya Australia dalam memberikan bantuannya kepada Indonesia, yaitu: motif kemanusiaan, motif politik dan motif keamanan nasional. Begitupula apa yang sudah dilakukan oleh Australia dalam memberikan bantuannya dengan adanya motif-motif yang sudah disebutkan. Walaupun pergantian pimpinan kedua negara dari masa ke masa kedua negara tersebut masih saling membutuhkan meskipun terkadang adanya situasi panas di dalam politik ataupun di dalam hubungan internasional dari kedua negara tersebut.

Melihat kerjasama antara Indonesia dengan Australia, dilihat dari sudut pandang asumsi mangkok dibandingkan asumsi pagar tinggi, dengan kata lain Indonesia masih membutuhkan bantuan/dana dari Australia dibandingkan harus membatasi hubungan yang ada, dan sebaliknya Australia membutuhkan Indonesia dalam kerjasama dalam isu kemanusiaan.

Selain bantuan dengan isu kemanusiaan yang diberikan kepada Indonesia, Australia juga memberikan bantuan melalui PBB atas dasar isu-isu kemanusiaan untuk negara-negara miskin ataupun negara berkembang lainnya. Selain itu, kerjasama antara Australia dan Indonesia perihal bantuan luar negeri untuk isu kemanusiaan dipenuhi adanya perdebatan-perdebatan mengenai teori-teori yang muncul yang ada di Hubungan Internasional. Perdebatan dan penjelasan dalam teori penulis juga menganalisis mengenai teori tersebut dalam kasus kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam isu kemanusiaan.

Untuk kedepannya kerjasama antara Australia dan Indonesia khususnya dalam isu kemanusiaan ataupun isu-isu lainnya, bagi pemerintah, Kementerian, instansi, LSM, ataupun masyarakat luas untuk lebih memperhatikan MoU yang ada antara pihak yang secara langsung ditunjuk oleh pemerintah Australia ataupun pihak pemerintah yang menandatangani nota kesepahaman yang sudah dibuat dengan tujuan bantuan yang diberikan tepat sasaran, dan untuk kemanusiaan. Begitu juga untuk pemerintah Indonesia ataupun LSM untuk memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas yang ada dan transparansi, kalau perlu dipublikasikan hal seperti ini, dimana publikasi masih belum optimal. Hal tersebut dilakukan

dengan maksud dan tujuan agar kepercayaan dari negara pendonor ataupun lembaga yang ditunjuk oleh pendonor dapat dipelihara dan kerjasama yang selama ini dibuat dan dikerjasamakan dapat terus berjalan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Barnett. N, Michael. 2011. Hubungan Internasional dan Ilmu Politik *Empire of Humanity: Sebuah Sejarah Kemanusiaan*. Ithaca. Cornell UP.

The Independent Commission on International Humanitarian Issues, Humanitarian is a basic orientation towards the interest and welfare of people (Dalam buku *The Winning Human Race. The Report of The Independent Commission on International Humanitarian Issues*).

Robbie Shiliam, (2011) *Hubungan Internasional dan Pemikiran Non-Barat*. Pustaka Pelajar.

PERENCANAAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG DARAT DALAM PENGUATAN KAPASITAS UMKM UNTUK MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Yusep Ginanjar
Kristyono Ratmoko

Abstrak

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk Integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Untuk mewujudkan MEA tersebut, para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 pada bulan November 2007 di Singapura, menyepakati *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*, sebagai acuan seluruh negara anggota dalam mengimplementasikan komitmen MEA. MEA adalah keniscayaan bagi Indonesia khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu Kabupaten di Indonesia yang harus mempersiapkan UMKM menghadapi MEA adalah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kesiapan itu harus bisa diimplementasikan melalui strategi-strategi yang dapat menjadikan UMKM di KBB mempunyai kemampuan dalam memaksimalkan performanya ditengah gempuran produk-produk dari negara-negara lain yang tergabung dalam MEA.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dilakukan di kabupaten Bandung Barat dengan mengambil data di dinas koperasi dan UKM, serta observasi langsung ke beberapa UMKM yang ada di kabupaten Bandung Barat. Serta dilakukan wawancara pada para pihak terkait.

Hasil dari penelitian ini yaitu perencanaan strategis yang dicanangkan adalah meningkatkan kualitas dan standar produk, meningkatkan akses finansial, Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UMKM, meningkatkan akses dan transfer teknologi bagi UKM untuk pengembangan UKM inovatif, memfasilitasi UKM berkaitan akses informasi dan promosi di luar negeri.

Kata Kunci : MEA, UMKM, Bandung Barat, Perencanaan Strategis

Latar Belakang

Pada saat ini sudah diimplemetasikan secara bertahap mengenai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). MEA terwujud dari keinginan negara-negara anggota *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) untuk mewujudkan ASEAN menjadi kawasan perekonomian yang solid dan diperhitungkan dalam percaturan perekonomian Internasional. Para Pemimpin ASEAN telah sepakat untuk mewujudkan MEA pada tahun 2015 dengan 4 pilar, yaitu (1) pasar tunggal dan basis produksi, (2) kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, (3) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara dan (4) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Dengan adanya MEA, tujuan yang ingin dicapai adalah adanya aliran bebas barang, jasa dan tenaga kerja terlatih (*skilled labour*), serta aliran investasi yang lebih bebas. Dalam penerapannya MEA akan menerapkan 12 sektor prioritas, yaitu perikanan, *e-travel*, *e-ASEAN*, automotif, logistik, industri berbasis kayu, industri berbasis karet, *furniture*, makanan dan minuman, tekstil serta kesehatan.

Bagi Indonesia, pembentukan MEA 2015 akan memberikan beberapa tantangan yang tidak hanya bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan sesama negara ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti Cina dan India. Persaingan yang ketat ini akan berdampak pada harga yang kompetitif pula, bukan hanya komoditi/produk/jasa unggulan industri besar (UB), tetapi juga sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena kesamaan karakteristik produk. Menyadari peran UMKM sebagai kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan

cukup dominan dalam perekonomian, maka pencapaian kesuksesan MEA 2015 mendatang juga akan dipengaruhi oleh kesiapan UMKM.

UMKM di Indonesia telah terbukti mampu bertahan dari guncangan ekonomi dan menjadi penyelamat bagi perekonomian pada krisis keuangan tahun 1997 dan krisis global 2008. Jumlah UMKM di Indonesia saat ini sekitar 55 juta, dan menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Meski secara kuantitas sangat besar dan menyerap banyak tenaga kerja, pangsa dalam pendapatan nasional masih sekitar 57%.

Di Indonesia, UMKM hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan baik yang bersifat klasik atau *intermediate* atau *advanced*. Permasalahan tersebut bisa berbeda di satu daerah dengan daerah lain atau antar sektor atau perusahaan pada sektor yang sama. Namun, ada sejumlah permasalahan yang umum dihadapi oleh semua UMKM. Walaupun perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM. Permasalahan klasik yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi UMKM, yaitu: rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi dan pasar serta faktor produksi lainnya. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung dan kelangkaan

bahan baku. Juga yang menyangkut perolehan legalitas formal yang hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di Indonesia

Dalam menghadapi MEA 2015 perlu dilakukan penguatan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional, terlebih dalam era MEA dimana akan terjadi integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan akhirnya akan mendorong kompetisi di bidang perekonomian. Berangkat dari permasalahan di atas bahwa UMKM yang seharusnya menjadi aktor penting bagi pengembangan perekonomian Indonesia, tetapi belum mendapat sokongan dan perlindungan dalam menjalankan usahanya, maka perlu dilakukan kajian mendalam guna menjabarkan bagaimana peran penting UMKM dan daya dukung pemerintah dalam membangun sektor UMKM untuk persiapan menghadapi MEA 2015 secara menyeluruh. Pembatasan bidang dalam penelitian ini merujuk pada linieritas *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint/Masyarakat Ekonomi ASEAN* yang menuntut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah berikut: Bagaimana perencanaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meningkatkan kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN?

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi serta aktivitas (Moleong, 2006:10). Kemudian menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk

menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi atau ada (John, 2010). Adapaun pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara.

Kerangka Teoritis

Kaum pluralis menganggap bahwa studi dalam Hubungan Internasional bukan hanya pada hubungan antara negara-negara saja, karena dalam Hubungan Internasional didalamnya terdapat pula hubungan antara masyarakat, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi yang berasal dari negara berbeda atau lintas batas internasional. Hubungan kerja sama yang coba diciptakan kaum pluralis ternyata menguntungkan ketimbang gengsi militer para kaum realis. Sehingga Viotti dan Kauppi berasumsi mengenai dasar-dasar Pluralisme yaitu : (1) *Non-state actors* adalah faktor utama dalam *world politics*, (2) *State* bukan *unitary actor* (3) *State's behavior* selalu rasional, (4) Agenda atau isu-isu dalam Hubungan Internasional. Beranjak pada hal tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan pluralisme dengan asumsi bahwa keterlibatan UMKM menjadi aktor internasional sebagai bagian dari pluralisme.

Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat

Geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06° 41' - 07° 19' Lintang Selatan dan 107° 22' - 108° 05' Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas

wilayah 1.305,77 Km² atau 130.577,40 Ha yang terbagi menjadi 16 wilayah administrasi Kecamatan yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling. Secara Geografis Kabupaten Bandung Barat Terletak di antara 60,3 73' sampai dengan 70,1 31' Lintang Selatan dan 1070,1 10' sampai dengan 1070,4 40' Bujur Timur.

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat yang cukup besar dapat dijadikan aset pembangunan bila kualitas sumber daya manusianya (SDM) dikelola dengan baik. Tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat mencapai 1.614.495 orang, penduduk laki-laki berjumlah 820.305 orang, sedangkan perempuan 794.190 orang, sehingga rasio jenis kelaminnya mencapai 1,03. Dengan rata-rata kepadatan penduduk per kilometer persegi mencapai 1.236 jiwa, dimana Kecamatan Ngamprah memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu sebanyak 4.605 orang per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Gununghalu merupakan kepadatan yang terendah yaitu sebesar 452 orang per kilometer persegi.

Struktur Ekonomi Bandung Barat

Pada tahun 2013 sektor sekunder masih mendominasi perekonomian Kabupaten Bandung Barat. Struktur ekonomi Kabupaten Bandung Barat pada periode 2011-2013 tampak mengalami pergeseran, meskipun relatif sangat kecil. Selama periode tersebut sektor sekunder mengalami penurunan selama

tiga tahun terakhir dari 51,31 persen (2011) menjadi 50,85 persen (2013). Sektor Perdagangan Hotel Restoran (PHR) menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir. Kabupaten Bandung Barat memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan tempat wisata alam yang representatif. Potensi tersebut mendorong kinerja sektor ini bergerak secara simultan untuk mendukung pengembangan obyek wisata yang ada. Sektor primer merupakan sektor dengan andil terkecil, yang disumbangkan oleh sektor pertanian, yaitu 14,57. Pada tahun 2013 kontribusi sektor ini mengalami kenaikan sebesar 2,5 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 11,83 persen menjadi 14,57 persen. Pada tahun 2012 pertanian khususnya nilai tambah komoditi tanaman pangan sempat mengalami perlambatan karena berkurangnya luas panen akibat kekeringan. Namun pada saat ini, sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman bahan makanan mengalami percepatan. Diakui bahwa kegiatan sub sektor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, tetapi berbagai upaya terus dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi lahan, sarana produksi dan teknologi yang ada agar produksi pertanian terus meningkat. Selain tanaman pangan, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi yang sangat bagus dalam pengembangan tanaman hortikultura.

Namun secara umum, perekonomian Kabupaten Bandung Barat masih didominasi oleh sektor industri dengan andil sebesar 41,76 persen. Diikuti oleh sektor (PHR) dan sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 21,22 persen dan 11,87 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar berlaku

selama kurun waktu 2011-2013 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. PDRB per kapita/tahun Atas Dasar Berlaku Kabupaten Bandung Barat tahun tahun 2010 Rp. 19,354,913.13 meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp. 21,721,238.05,- dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 24,675,243.28,-.

Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai 10,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB per kapita atas dasar berlaku tidak menggambarkan peningkatan secara riil, tetapi lebih disebabkan adanya pengaruh kenaikan harga atau tingkat inflasi yang terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar konstan 2000 yang menggambarkan nilai tambah riil penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2010 sebesar Rp. 8,502,534.79,- dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 9,016,250.41,- Sedangkan PDRB per kapita tahun 2013 mencapai Rp. 9,552,080.77,- atau tumbuh sebesar 4,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan investasi di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dari perkembangan Pembentukan Barang Modal Tetap Bruto (PMTB). Selama periode 2009-2012 PMTB di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 1.972.801,27 juta rupiah pada tahun 2009 menjadi 2.953.271,09 juta rupiah pada tahun 2012. Dilihat dari institusi pelaku PMTB terbagi empat yaitu: swasta, rumah tangga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemerintah.

Kondisi UMKM di Kabupaten Bandung Barat

Setiap bisnis pasti akan mengalami pasang surut serta untung dan rugi dalam perjalanannya. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pun menjadi salah satu indikator kemunduruan atau kemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung Barat. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Bandung Barat, yaitu keterbatasan modal kerja dan/atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi, SDM dengan kualitas yang baik (terutama manajemen dan teknisi produksi), informasi khususnya mengenai pasar dan kesulitan dalam pemasaran (termasuk manajemen dan teknisi distribusi). Adapun penjelasannya seperti di bawah ini:

1. Kesulitan Pemasaran

Dalam literatur, pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UKM. Hasil dari suatu studi lintas negara yang dilakukan oleh James dan Akrasanee (1998) di sejumlah negara ASEAN menunjukkan bahwa pemasaran adalah termasuk *growth constraint* yang dihadapi oleh banyak pengusaha kecil dan menengah (masalah ini dijumpai tidak terlalu serius di Singapura). Pada dasarnya jika UMKM tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek-aspek yang terkait dengan pemasaran seperti kualitas produk dan kegiatan promosi, maka sulit sekali bagi UKM untuk dapat turut berpartisipasi dalam era

promosi maka sulit sekali bagi UKM untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas.

Hasil studi lapangan pada UMKM di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh UMKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk produk serupa buatan luar negeri dan impor, maupun di pasar ekspor. Jika melihat fakta pada saat ini, negara-negara Asia yang terkena krisis keuangan seperti Indonesia, Filipina dan Korea Selatan, masalah pemasaran bisa menjadi lebih serius, karena sebagai salah satu efek dari krisis tersebut akses ke kredit bank menjadi sulit (kalau tidak dapat dikatakan tertutup sama sekali), ditambah lagi dengan mahalanya bahan baku yang pada umumnya diimpor, dan permintaan pasar dalam negeri yang menurun karena merosotnya tingkat pendapatan riil masyarakat per kapita. Akibatnya dapat diduga bahwa banyak UKM tidak memiliki sumber daya produksi yang cukup untuk paling tidak mempertahankan volume produksi dan memperbaiki kualitas dari produk-produk mereka, dan ini berarti mereka semakin sulit untuk meningkatkan atau bahkan mempertahankan tingkat daya saing mereka di pasar domestik maupun pasar internasional.

2. Keterbatasan Finansial

UKM diKabupaten Bandung Barat menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial: mobilisasi modal awal (*start-up capital*) dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan *output* jangka panjang. Walau pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi, apa lagi untuk investasi (perluasan kapasitas produksi atau menggantikan mesin-mesin tua). Sementara, mengharapkan sisa dari kebutuhan finansial sepenuhnya dibiayai oleh dana dari perbankan jauh dari realitas. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika hingga saat ini walaupun begitu banyak skema-skema kredit dari perbankan dan dari bantuan BUMN, sumber-sumber pendanaan dari sektor informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan UKM, terutama usaha mikro/rumah tangga. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Tambunan (1994 dan 2000), hal ini disebabkan oleh pengusaha yang tinggal di daerah yang relatif terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi terlalu bertele-tele dan kurang informasi mengenai skema- skema perkreditan yang ada dan prosedurnya.

Di Kabupaten Bandung Barat dalam hal jenis kepemilikan modal, baik di kelompok IK maupun IRT jumlah pengusaha yang membiayai usahanya sepenuhnya dengan uang sendiri atau dengan modal sendiri dan pinjaman, lebih banyak daripada jumlah pengusaha yang menggunakan 100 persen modal dari pihak lain. Walaupun komposisinya bervariasi menurut golongan besar

industri, baik di IK maupun di IRT sebagian besar dari jumlah pengusaha dengan 100 persen modal sendiri terdapat di industri makanan, minuman dan tembakau, industri kulit, tekstil dan produk-produknya, dan industri kayu, bambu dan rotan serta produk-produknya.

3. Keterbatasan SDM

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak UKM di Kabupaten Bandung Barat, terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produksi, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, data *processing*, teknik pemasaran dan penelitian pasar. Sedangkan, semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Penguatan Kapasitas UMKM

Dari data gambaran umum Kabupaten Bandung Barat yang dihasilkan bahwa ada banyak UMKM yang terdaftar di pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Akan tetapi, dalam kenyataannya yang sangat aktif melakukan usaha hanya sepertiganya. Adapun perencanaan strategis pemerintah Kabupaten Bandung Barat

berdasarkan persoalan-persoalan yang muncul di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan standar produk

Guna dapat memanfaatkan peluang dan potensi pasar di kawasan ASEAN dan pasar global, maka produk yang dihasilkan UKM haruslah memenuhi kualitas dan standar yang sesuai dengan kesepakatan ASEAN dan negara tujuan. Dalam kerangka itu, maka UKM harus mulai difasilitasi dengan kebutuhan kualitas dan standar produk yang dipersyaratkan oleh pasar ASEAN maupun di luar ASEAN. Peranan dukungan teknologi untuk peningkatan kualitas dan produktivitas serta introduksi desain kepada para pelaku UKM yang ingin memanfaatkan pasar ASEAN perlu segera dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara menurut Bupati Kabupaten Bandung Barat, Abu Bakar, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat telah berupaya untuk memberikan pelatihan untuk peningkatan kualitas dan standar produk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di Kabupaten Bandung Barat ada sekitar 42.000 pelaku usaha, tetapi data itu sudah lama. Pada 2016, kami sendiri mencatat setidaknya ada sekitar 20.300 pelaku usaha dari semua jenis usaha. Sementara yang sudah terbina oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) ada 5.940 pelaku usaha. Jadi, sebetulnya masih banyak pelaku usaha yang perlu dibina dan dibantu dalam meningkatkan kualitas dan standar produk agar UMKM di Kabupaten Bandung Barat dapat berkembang menjadi pengusaha besar.

2. Meningkatkan akses finansial

Isu finansial dalam pengembangan bisnis UKM sangatlah klasik. Selama ini, belum banyak UKM yang bisa memanfaatkan skema pembiayaan yang diberikan oleh perbankan. Hasil survey *Regional Development Institute* (REDI, 2002) menyebutkan bahwa ada 3 *gap* yang dihadapi berkaitan dengan akses finansial bagi UKM, (1) aspek formalitas, karena banyak UKM yang tidak memiliki legal status; (2) aspek skala usaha, dimana sering sekali skema kredit yang disiapkan perbankan tidak sejalan dengan skala usaha UKM; dan (3) aspek informasi, dimana perbankan tidak tahu UKM mana yang harus dibiayai, sementara itu UKM juga tidak tahu skema pembiayaan apa yang tersedia di perbankan. Oleh karena itu, maka ketiga *gap* ini harus diatasi, diantaranya dengan peningkatan kemampuan bagi SDM yang dimiliki UKM, perbankan serta pendampingan UKM. Pada sisi lain, harus juga diberikan informasi yang luas tentang skema-skema pembiayaan yang dimiliki perbankan.

Para Pengusaha UMKM di Kabupaten Bandung Barat sudah mulai dikordinasikan dan dikonsolidasikan untuk dapat meningkatkan akses finansial. Memang dalam hal ini pemerintah belum melakukan upaya secara langsung mendatangi para perbankan atau membuat peraturan dan program secara umum untuk UMKM. Akan tetapi, langkah yang diambil oleh Kabupaten Bandung Barat adalah dengan memberikan bantuan permodalan secara langsung pada 2000 perempuan yang menyandang status janda dan melakukan usaha kecil melalui program PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga). Setiap kelompok

usaha diberikan modal 10 juta dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan sebagiannya lagi mendapat 25 juta perkelompok dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu untuk UMKM secara umum pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengarahkan dan memfasilitasi UMKM nya untuk bisa mengikuti program yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, yaitu program Kredit Cinta Rakyat atau KCR melalui Bank Jawa Barat (BJB) untuk UMKM. Hal tersebut telah dilakukan mulai dari tahun 2012.

3. Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UMKM

Secara umum kualitas SDM pelaku UKM di Indonesia masih rendah. Terlebih lagi *spirit* kewirausahaannya. Kalau mengacu pada data UKM pada tahun 2008, tingkat kewirausahaan di Indonesia hanya 0,25% dan pada tahun 2011 diperkirakan sebesar 0,273%. Memang hal ini sangat jauh ketinggalan dengan negara-negara lain di dunia, termasuk di Asia dan ASEAN. Sebagaimana di Singapura, tingkat kewirausahaan di Singapura lebih dari 7% demikian juga di Amerika Serikat (USA), tingkat kewirausahaannya sudah mencapai 11,9%.

Oleh karena itu, untuk memperkuat kualitas dan kewirausahaan UKM di Indonesia, maka diperlukan adanya pendidikan dan latihan keterampilan, manajemen, dan pendidikan kilat (diklat) teknis lainnya yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan kewirausahaan juga perlu ditingkatkan. Pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional pada tanggal 2 Februari 2011 ditindaklanjuti dengan langkah konkrit,

seperti penyusunan *grand strategy* pengembangan kewirausahaan dan pelaksanaan di lapangan yang dilakukan dalam kaitannya dan bertanggung jawab. Hal penting yang juga perlu diperhatikan adalah perlunya dukungan modal awal terutama bagi wirausaha pemula.

Turunan dari program tersebut maka pemerintah Kabupaten Bandung barat untuk dapat meningkatkan jiwa usaha memberikan beasiswa pada para petani muda dan pelaku usaha kecil menengah agar bisa mampu mengembangkan usahanya. Selain dari itu, khususnya untuk para petani muda diberikan program magang ke Jepang agar bisa mengembangkan produk pertaniannya.

4. Memperkuat dan meningkatkan akses dan transfer teknologi bagi UKM untuk pengembangan UKM inovatif

Akses dan transfer teknologi untuk UKM masih merupakan tantangan yang dihadapi di Indonesia khususnya Kabupaten Bandung Barat. Peranan inkubator, lembaga riset dan kerjasama antara lembaga riset dan perguruan tinggi serta dunia usaha untuk alih teknologi perlu digalakkan. Kerjasama atau kemitraan antara perusahaan besar, baik dari dalam dan luar negeri dengan UMKM harus didorong untuk alih teknologi dari perusahaan besar kepada UKM. Praktik seperti ini sudah banyak berjalan di beberapa negara maju, seperti USA, Jerman, Inggris, Korea, Jepang dan Taiwan. Model-model pengembangan klaster juga harus dikembangkan, karena melalui model tersebut akan terjadi alih teknologi kepada dan antar UKM.

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat tantangan yang paling penting adalah transfer pengetahuan teknologi untuk pengembangan produk dan pemasaran. Untuk hal ini pemerintah Kabupaten Bandung Barat memaksimalkan berbagai pelatihan dan pendidikan melalui berbagai lembaga diantaranya adalah Balai Penelitian Tanaman Sayuran (BALITSA), Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Perah (BPPT-SP) dan Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja (BBPPK) Lembang. Sementara untuk hasil kerajinan dan produk kreatif melalui Dekranasda Kabupaten Bandung Barat.

Pelatihan teknologi lainnya adalah mengenai pemasaran melalui *online*. Pelatihan teknologi dan informasi dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat melalui Balai Informasi Cermat. Di Balai Informasi Cermat masyarakat secara umum dan khususnya para pelaku usaha diberikan pelatihan mengenai *website* dan pemasaran secara *online*.

5. Memfasilitasi UKM berkaitan akses informasi dan promosi di luar negeri

Bagian terpenting dari proses produksi adalah masalah pasar. Sebaik apapun kualitas produk yang dihasilkan, kalau masyarakat atau pasar tidak mengetahuinya, maka produk tersebut akan sulit dipasarkan. Oleh karena itu, maka pemberian informasi dan promosi produk-produk UKM, khususnya untuk memperkenalkan di pasar ASEAN harus ditingkatkan.

Promosi produk, bisa dilakukan melalui dunia maya atau mengikuti kegiatan-kegiatan pameran di luar negeri. Dalam

promosi produk ke luar negeri ini perlu juga diperhatikan kesiapan UKM dalam penyediaan produk yang akan dipasarkan. Sebaiknya dihindari mengajak UKM ke luar negeri, padahal mereka belum siap untuk mengeksport produknya ke luar negeri. Dalam kaitan ini, bukan saja kualitas dan desain produk yang harus diperhatikan, tetapi juga tentang kuantitas dan kontinuitas produknya.

Selain dari itu guna mendorong daya saing produk-produk dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat membuka Gerai UMKM di Jalan Seskoau, Lembang. Diharapkan, Gerai UMKM itu bisa menjadi pelengkap tujuan wisata di kawasan Lembang (Pikiran Rakyat,2017).

Penutup

MEA memang suatu kondisi yang harus bisa dilewati oleh segenap elemen bangsa Indonesia khususnya UMKM. Hasil dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa ada berbagai persoalan yang muncul yaitu keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan finansial dan persoalan pemasaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat telah mempersiapkan strategi memaksimalkan kapabilitas UMKM dalam bersaing dengan UMKM yang lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Program-program yang dicanangkan adalah: Meningkatkan kualitas dan standar produk; Meningkatkan akses finansial;

Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan UMKM; Memperkuat dan meningkatkan akses dan transfer teknologi bagi UKM untuk pengembangan UKM inovatif; Memfasilitasi UKM berkaitan akses informasi dan promosi di luar negeri. Sebagian program telah dilaksanakan dan mulai terlihat hasilnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. (2002). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Agustino, Leo. (2005). Politik dan Otonomi Daerah. Banten : Untirta Press.
- Ali M, Takdir. (2013). Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia. Yogyakarta. The Phinisi Press.
- Arikunto Suharsimi (1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Djelantik, Sukawarsini. (2008). Diplomasi antara Teori dan Praktik. Jakarta : Graha Ilmu.
- Gaffur, Abdul at all. (2006).Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Jawahir Thontowi, Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa

Barat dan DIY) JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 16 APRIL 2009: 149-168).

Kushandajani. (2011). Makna Otonomi Daerah Di Wilayah Laut Bagi Masyarakat Pesisir. Semarang : FISIP UNDIP

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.

Mazmanian Daniel A. dan Paul A. Sabatier, 1983. Implementation and Public Policy. America, Foresman and Company.

Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

_____ 2001. Metode Penelitian Kualitatif, cetakan keempatbelas, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (anggota IKAPI).

Obsatar Sinaga, Implementasi Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah dan Hubungannya dengan Kebijakan One Door Policy Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Administratur. Vol. 3 \ No. 3 \ Desember 2010

MENANAMKAN KONSEP MULTIKULTURALISME DI INDONESIA

Zaenal Abidin As

Abstract

Diversity is one of the patterns of social life, and this can not be avoided. Indonesia as a pluralistic country requires a value system that can make this into a unique diversity if managed well, but if not it is a big challenge given will cause a problems such as social conflict, conflict horizontal and national disintegration. Ideology of Pancasila as the nation has not been able to realize a multicultural life, so that the necessary education multiculturalism so that the values contained in Pancasila and" Bhineka Tunggal Ika" can be realized.

Key Words: *Indonesia, Diversity, Multiculturalism, Pancasila, Ethnic*

Latar Belakang

Pada empat dekade terakhir abad ke 21 ini menjadi saksi munculnya beberapa intelektual dan pergerakan sosial yang dipimpin oleh beberapa kelompok yang beragam seperti penduduk asli (*indigenous people*), minoritas-minoritas nasional, bangsa ethno-budaya (*ethno-cultural nations*), para pendatang baru dan lama, para feminis, para homo dan lesbian dan juga kelompok atau partai hijau. Mereka dengan gencar menyuarakan suaranya dan tidak segan-segan untuk mempraktikkan dan menunjukkan kepada dunia seperti gaya hidup, pandangan-pandangan mereka dan juga cara hidup yang sangat berbeda dengan budaya dominan

yang saat ini masih dipegang teguh di mana masih dianggap paling baik dan sesuai serta diterima oleh masyarakat kebanyakan. Di dalam cara-cara mereka yang berbeda dan dianggap menyimpang itu, mereka menginginkan keberadaan mereka diterima baik oleh masyarakat luas akan adanya legitimasi perbedaan yang mereka miliki, khususnya bagi mereka yang ingin menunjukkan jati diri (*identity*) yang selama ini terhalang oleh kebiasaan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pergerakan-pergerakan mereka membentuk perlawanan bagi penerimaan identitas dan perbedaan (*identity-related differences*).

Untuk menerima perbedaan yang ada maka dibutuhkan toleransi yang tinggi. Toleransi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti batas ukur untuk penambahan dan pengurangan yang masih diperbolehkan; penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Biasanya rasa toleransi itu besar kepada orang lain ketika kita melakukan interaksi dengan orang asing. Toleransi bagi penulis sendiri adalah memberikan kelonggaran lebih sedikit dari batasan yang telah ditetapkan terhadap sesuatu yang kita yakini, ketika orang lain itu berbeda atas apa yang kita anggap itu benar. Kelompok-kelompok yang berbeda tersebut di atas menginginkan toleransi: penerimaan, penghormatan, bahkan penegasan publik atas perbedaan yang ada. Beberapa kelompok tersebut menginginkan masyarakat luas memperlakukan mereka secara adil dan sama serta tidak mendiskriminasikan, melawan, bahkan menempatkan posisi yang tidak menguntungkan mereka di dalam segala bidang kehidupan baik pribadi maupun secara kolektif. Paham atau pandangan yang

mendukung tentang keberagaman itulah yang disebut sebagai multikulturalisme.

Di dalam tulisan ini akan lebih menekankan pada definisi multikulturalisme, penyebab multikulturalisme, permasalahan multikulturalisme, tantangan multikulturalisme dan juga pendidikan multikulturalisme di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang majemuk dan sangat beragam. Baik dari agama, etnis, kebiasaan, budaya. Kelompok-kelompok minoritas pun sudah mulai eksis keberadaannya khususnya seperti kelompok *gay* dan lesbian.

Definisi Multikulturalisme

Multikulturalisme memiliki banyak pengertian. Salah satu pengertiannya menekankan adanya penghargaan terhadap keanekaragaman di luar kebiasaan atau budaya dominan. Pandangan multikulturalisme bermanfaat untuk mengetahui bagaimana struktur sosial menciptakan dan menjaga budaya-budaya yang berbeda dalam suatu masyarakat.

Menurut Azyumardi Azra, “Multikulturalisme” pada dasarnya adalah “pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat” (Rivai 2004). Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik.

Bhikhu Parekh mengatakan bahwa masyarakat multikultural adalah “suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihanannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan” (2004). “*A Multicultural society, then is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinct conception of the world, system of [meaning, values, forms of social organizations, historis, customs and practice]*”.

Menurut Lawrence Blum, multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya

seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Suparlan menyebutkan multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Sementara menurut M. Atho' Muzhar, "Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, tetapi mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut" (Rivai 2004).

Penyebab Multikulturalisme

Dalam kerangka politik multikulturalisme, Kymlicka mengemukakan terdapat dua aspek munculnya multikulturalisme, yakni migrasi yang masuk ke suatu daerah dan adanya kebanggaan sebagai minoritas. Aspek pertama dialami oleh negara-negara tujuan imigran dalam studi kasus yang diteliti pada negara Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Sedangkan aspek kedua lebih bersifat pada unsur identitas yang dimiliki oleh individu yang dirasa lebih kuat dari pada rasa nasionalismenya (Kymlicka 2011).

Pada dasarnya semua bangsa di dunia bersifat multikultural. Adanya masyarakat multikultural memberikan nilai tambah bagi bangsa tersebut. Keragaman ras, etnis, suku ataupun agama menjadi karakteristik tersendiri, sebagaimana bangsa Indonesia

yang unik dan rumit karena kemajemukan suku bangsa, agama, bangsa maupun ras. Masyarakat multikultural Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau Bhinneka Tunggal Ika yang multikultural, yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat nasional dan lokal.

Faktor-faktor penyebab timbulnya masyarakat yang multikultural adalah keadaan geografis, pengaruh kebudayaan asing, perkawinan campur dan juga iklim yang berbeda. Indonesia, sebagai sebuah negara yang kaya akan khazanah budaya. Dilihat dari keadaan geografis Indonesia, terdapat beribu-ribu pulau berjajar dari ujung Barat sampai ujung Timur, mulai dari Sumatra hingga Papua. Setiap pulau memiliki suku bangsa, etnis, agama dan ras masing-masing. Dilihat dari pengaruh kebudayaan asing, seperti masuknya etnis Cina, Arab dan maupun India dan turun menurun membuat masyarakat Indonesia mempunyai kebiasaan yang berbeda dan juga cara pandang hidup pula. Selain itu, pengaruh kebebasan barat seperti kesetaraan gender, juga eksistensi lesbian dan *gay* yang menampakkan keberadaannya di umum, membentuk beberapa kelompok yang merasa memiliki identitas dan keadaan yang sama membuat kelompok di Indonesia juga mulai bermunculan meskipun terbatas dan diketahui oleh kalangan-kalangan tertentu. Sementara itu, iklim atau cuaca yang berbeda di Indonesia membuat kebiasaan masyarakat untuk bercocok tanam berbeda-beda. Keadaan inilah yang menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat multikultural.

Permasalahan Multikulturalisme

Keanekaragaman budaya dan masyarakat dianggap pendorong utama munculnya persoalan-persoalan baru bagi bangsa Indonesia. Contoh keanekaragaman yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Suku Bangsa

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa banyaknya. Yang menjadi sebab adalah keberadaan ratusan suku bangsa yang hidup dan berkembang di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Kita bisa membayangkan apa jadinya apabila masing-masing suku bangsa itu mempunyai karakter, adat istiadat, bahasa, kebiasaan dan lain-lain. Kompleksitas nilai, norma dan kebiasaan itu bagi warga suku bangsa yang bersangkutan mungkin tidak menjadi masalah. Permasalahan baru muncul ketika suku bangsa itu harus berinteraksi sosial dengan suku bangsa yang lain.

2. Keanekaragaman Agama

Letak kepulauan Nusantara di posisi silang di antara dua samudra dan dua benua, jelas mempunyai pengaruh yang penting bagi munculnya keanekaragaman masyarakat dan budaya. Dengan didukung oleh potensi sumber alam yang melimpah, maka Indonesia menjadi sasaran pelayaran dan perdagangan dunia. Apalagi didalamnya telah terbentuk jaringan perdagangan dan pelayaran antarpulau. Dampak interaksi dengan bangsa-bangsa lain itu adalah masuknya beragam bentuk pengaruh agama dan kebudayaan. Selain melakukan aktivitas perdagangan, para saudagar Islam, Hindu, Buddha, juga membawa dan menyebarkan

ajaran agamanya. Apalagi setelah bangsa Barat juga masuk dan terlibat didalamnya. Agama-agama besar pun muncul dan berkembang di Indonesia, dengan jumlah penganut yang berbeda-beda. Kerukunan antarumat beragama menjadi idam-idaman hampir semua orang, karena tidak satu agama pun yang mengajarkan permusuhan.

3. Keanekaragaman Ras

Salah satu dampak terbukanya letak geografis Indonesia, banyak bangsa luar yang bisa masuk dan berinteraksi dengan bangsa Indonesia. Misalnya, keturunan Arab, India, Persia, Cina, Hadramaut dan lain-lain. Dengan sejarah, kita bisa merunut bagaimana asal usulnya. Bangsa-bangsa asing itu tidak saja hidup dan tinggal di Indonesia, tetapi juga mampu berkembang secara turun-temurun membentuk golongan sosial dalam masyarakat kita. Mereka saling berinteraksi dengan penduduk pribumi dari waktu ke waktu. Bahkan ada di antaranya yang mampu mendominasi kehidupan perekonomian nasional. Misalnya, keturunan Cina.

Konsep Multikulturalisme di Indonesia

Konsep Multikulturalisme sebenarnya telah dituangkan oleh para pendiri bangsa Indonesia untuk menggambarkan kebudayaan bangsa Indonesia kedalam sebuah konsep ideologi bangsa (Pancasila). namun tidaklah dapat disamakan konsep Multikulturalisme dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan

keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan (Bhineka Tunggal Ika). Permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral dan tingkat serta mutu produktivitas.

Dalam upaya membangun masa depan bangsa, paham multikulturalisme sebagai sebuah ideologi yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri yang terpisah dari ideologi-ideologi lainnya. Multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep-konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan untuk memahaminya dan mengembangkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia.

Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme terdapat dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yaitu hubungan antar manusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya yang ada merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia. Multikulturalisme dibutuhkan di

Indonesia untuk meningkatkan masyarakat majemuk yang akan secara bertahap memasuki masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural merupakan sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau Bhinneka Tunggal Ika yang multikultural, yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat lokal dan nasional.

Permasalahan multikulturalisme masih mengancam negeri ini. Terbukti, sepuluh tahun terakhir ini masih ada saja peristiwa-peristiwa yang berakhir tragis, melanda sejumlah daerah di Indonesia terkait dengan perbedaan agama, suku atau etnis. Adanya keberagaman di negeri ini berpotensi sebagai pemicu konflik yang mengarah pada kekerasan, penyerangan, perusakan, pembakaran, penganiayaan, penangkapan dan intimidasi. Akibat keanekaragaman kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat multikultural Indonesia sering dijumpai berbagai masalah, seperti kesenjangan dalam aspek kemasyarakatan, kesenjangan dalam sosiogeografis, kesenjangan perekonomian, kesenjangan antara mayoritas, minoritas, pribumi, dan non pribumi serta berbagai konflik sosial yang berbau Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA). Beberapa contoh yang masih terekam seperti: tragedi Poso, Sampit, Mei 1998; penutupan dan pembakaran rumah-rumah ibadah; Tragedi Monas; dan sejumlah perselisihan lain yang mengatasnamakan keberagaman.

Permasalahan multikulturalisme yang tercermin dalam berbagai peristiwa seperti disebut di atas, terlihat sebagai produk sosial (kolektivitas) yang oleh pemikir Prancis Pierre Bourdieu disebut sebagai *habitus* di dalam bukunya *The Logic of Practice*.

Habitus merupakan sebuah tindakan pengkondisian yang dikaitkan dengan keberadaan suatu kelas (Bourdieu, 1990). Dalam hal ini, kelas dominanlah yang amat menentukan jalannya struktur pengkondisian. Kelas dominan ini tentunya adalah mereka yang memegang kekuasaan penuh, baik secara simbolik, sosial, atau budaya. Hal ini dilakukan untuk bisa mengontrol segalanya, sehingga pengkondisian terlihat sebagai sebuah gejala alamiah dan berkembang di lingkungan sosial tertentu.

Tantangan Multikulturalisme

Kenyataan ini menjadikan suatu tantangan baru bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat multikultural yang damai. Upaya membangun Indonesia yang multikultural dapat dilakukan dengan cara dan langkah yang tepat. *Pertama* menyebarkan konsep multikulturalisme secara luas dan memahamkan akan pentingnya multikulturalisme bagi bangsa Indonesia, serta mendorong keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya. *Kedua*, membentuk kesamaan pemahaman di antara para ahli mengenai makna multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya. *Ketiga*, berbagai upaya dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini.

Pendidikan Multikulturalisme

Di dalam kehidupan yang multikultural dalam sketsa paling awal lebih baik ditopang oleh sistem pendidikan yang lebih berorientasi pada multikultural. Pendidikan multikultural merupakan salah satu mata pelajaran yang penuh kontroversi, khususnya di negara Amerika Serikat. Azyumardi azra mendefinisikan Pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan demi secara keseluruhan (Azra 2007). Prudence Crandall mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap latar belakang peserta didik baik dari aspek keragaman suku (etnis), ras, agama (aliran kepercayaan) dan budaya (kultur). Secara lebih singkat Andersen dan Custer mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman budaya. Sedangkan, Musa Asy'ari juga menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.

James A. Banks telah mendeskripsikan evolusi pendidikan multikultural dalam empat fase. Yang *pertama*, ada upaya untuk mempersatukan kajian-kajian etnis pada setiap kurikulum. *Kedua*, hal ini diikuti oleh pendidikan multietnis sebagai usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. Yang *ketiga*, kelompok-kelompok marginal yang lain, seperti perempuan, orang cacat, homo dan lesbian, mulai

menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam lembaga pendidikan. Fase *keempat* perkembangan teori, riset dan praktek, perhatian pada hubungan antar-ras, kelamin, dan kelas telah menghasilkan tujuan bersama bagi kebanyakan ahli teoritis, jika bukan para praktisi, dari pendidikan multikultural (Banks 2007). Gerakan reformasi mengupayakan transformasi proses pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkatan sehingga semua murid, apapun ras atau etnis, kecacatan, jenis kelamin, kelas sosial dan orientasi seksualnya akan menikmati kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan.

Sonia Nieto menyebutkan bahwa “pendidikan multikultural bertujuan untuk sebuah pendidikan yang bersifat anti rasis; yang memperhatikan ketrampilan-ketrampilan dan pengetahuan dasar bagi warga dunia; yang penting bagi semua murid; yang menembus seluruh aspek sistem pendidikan; mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang memungkinkan murid bekerja bagi keadilan sosial; yang merupakan proses dimana pengajar dan murid bersama-sama mempelajari pentingnya variabel budaya bagi keberhasilan akademik; dan menerapkan ilmu pendidikan yang kritis yang memberi perhatian pada bangunan pengetahuan sosial dan membantu murid untuk mengembangkan ketrampilan dalam membuat keputusan dan tindakan sosial” (Nieto & Bone 2012).

Di dalam konteks Indonesia, multikultural mendapatkan momentum setelah jatuhnya era Orde Baru. Menurut Sosiolog Universitas Indonesia (UI), Parsudi Suparlan, “Multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan alasan multikulturalisme merupakan sebuah

ideologi yang mengagungkan perbedaaan budaya, atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat” (Suparlan et al 2002). Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural. Pendidikan Multikultural dianggap menjadi alternatif sebagai salah satu solusi konflik. Dengan demikian pendidikan multikulturalisme sangat bermanfaat untuk membangun kohesifitas, soliditas dan intimitas di antara keragamannya etnik, ras, agama, budaya dan kebutuhan di antara kita. Paparan di atas juga memberi dorongan dan *spirit* bagi lembaga pendidikan nasional untuk menanamkan sikap kepada peserta didik untuk menghargai orang, budaya, agama dan keyakinan lain. Harapannya, dengan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural, akan membantu siswa mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian. Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah, akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai.

Kesimpulan

Keberagaman adalah hal yang tidak dapat dihindarkan di dalam kehidupan sosial, hal ini adalah konsekuensi logis yang harus dialami di dalam kehidupan sosial, keberagaman ini bisa dijadikan sebuah khasanah kekhasan di dalam sebuah daerah atau negara, tetapi hal ini juga dapat menjadi sebuah permasalahan yang serius bila tidak ditangani dengan baik. Konflik horisontal, konflik sosial dan disintegrasi bangsa akan menjadi hal yang sering ditemukan di dalam negara yang majemuk dan tentunya akan menjadikan penghambat dalam pembangunan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Multikulturalisme sebuah ideologi yang dianggap mampu menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan Multikulturalisme. Yaitu dengan asas-asas sebagai berikut:

- a) Manusia yang tumbuh dan besar pada hubungan sosial di dalam sebuah tatanan tertentu, dimana sistem nilai diterapkan dalam berbagai simbol-simbol budaya dan ungkapan-ungkapan bangsa. Artinya bahwa simbol-simbol perbedaan ini harus diakui, sehingga dapat dijadikan sebuah kekhasan dan pembeda dengan simbol-simbol yang lain.
- b) Keanekaragaman Budaya menunjukkan adanya visi dan sistem yang berbeda, sehingga budaya yang satu memerlukan budaya lain. Dengan mempelajari kebudayaan lain, maka akan memperluas cakrawala pemahaman akan dapat mengerti makna multikulturalisme.
- c) Setiap kebudayaan secara internal adalah majemuk, sehingga dialog berkelanjutan sangat diperlukan demi terciptanya

persatuan. Atau dengan kata lain, hal ini akan menumbuhkan komunikasi lintas budaya dan akan membentuk rasa nasionalisme yang tinggi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga partisipasi yang pluralistik akan terwujud dan akan mempercepat pembangunan di berbagai aspek.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, pemahaman timbal balik sangat dibutuhkan, untuk mengatasi hal-hal yang negatif dari suatu masalah integrasi bangsa. Paradigma hubungan timbal balik dalam masyarakat multikultural mensyaratkan tiga kompetensi normatif, yaitu kompetensi kebudayaan, kemasyarakatan dan kepribadian. Kompetensi kebudayaan adalah kumpulan pengetahuan yang memungkinkan mereka yang terlibat dalam tindakan yang komunikatif. Kompetensi kemasyarakatan merupakan tatanan-tatanan yang memungkinkan mereka yang terlibat dalam tindakan komunikatif membentuk solidaritas. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang memungkinkan seseorang dapat berbicara dan bertindak dan mampu berpartisipasi dalam proses pemahaman timbal balik sesuai konteks tertentu dan mampu memelihara jati dirinya sendiri dalam berbagai perubahan interaksi.

Semangat kebersamaan dalam perbedaan seperti yang terdapat dalam "Bhineka Tunggal Ika" perlu menjadi semangat atau *spirit* penggerak setiap tindakan khususnya dalam proses pengambilan keputusan politik, keputusan yang menyangkut persoalan kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan

mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam keragaman. Demokratis dan berkeadilan sosial, belum sepenuhnya tercapai. Konsekuensinya adalah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif, memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralistik, tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan.

Dengan demikian, dapat terlihat bahwa semboyan 'Satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa' dan 'Bhinneka Tunggal Ika' masih jauh dari kenyataan sejarah. Ia masih merupakan mitos yang perlu didekatkan dengan realitas sejarah. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kokoh, beranekaragam budaya, etnik, suku, ras dan agama, yang semuanya itu akan menjadikan Indonesia menjadi sebuah bangsa yang mampu mengakomodasi kemajemukannya itu menjadi suatu yang tangguh. Sehingga ancaman disintegrasi dan perpecahan bangsa dapat dihindari.

Dengan adanya pemahaman dan pendidikan multikulturalisme di Indonesia, memungkinkan akan terwujudnya komunikasi lintas budaya. Artinya adanya keinginan untuk saling mengenal antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya, sehingga hal ini akan mengurangi gesekan-gesekan yang ditimbulkan dari perbedaan-perbedaan yang ada di dalam membangun dan mengembangkan potensi yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi, 2007. Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia
- Bourdieu, Pierre. 1990. *The Logic of Practice*. Standford-Calif: Standford University Press.
- Parekh, Bhikhu . *Rethinking Multiculturalisme: Cultural Diversity and Political Theory*.
- Parsudi suparlan, dkk, 2002. Antara Prasangka dan Realita : Telaah kritis wacana anti Cina di Indonesia. Pustaka inspirasi
- Harahap, Ahmad Rivai, 2004. “Multikulturalisme dan Penerapannya dalam pemeliharaan kerukunan Umat Beragama”.
- James A Banks, (2nd Edition, 2007). *Educating Citizens in a Multicultural Society*. New York: Teachers College Press.
- Kymlicka, Will. 2011. Kewargaan Multikultural. Cetakan kedua, Jakarta : LP3ES
- Sonia Neito and Patty Bone, 2012 *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education*

Tinjauan Buku

Jusmalia Oktaviani

Judul	: <i>Asia Rising: Who is Leading?</i>
Tahun terbit	: 2008
Penerbit	: <i>World Scientific Publishing</i> , Singapura
Penulis	: Amitav Acharya
Jumlah halaman	: 191 halaman

Penstudi Hubungan Internasional (HI) biasanya tidak asing dengan nama Amitav Acharya. Berasal dari India, Acharya merupakan salah satu akademisi HI *non-Western* yang sudah banyak memberikan sumbangan bagi ilmu HI. Ia sudah menulis beberapa buku, terutama yang berkaitan dengan Asia Tenggara. Acharya juga mengajar di berbagai perguruan tinggi di beberapa negara, seperti Kanada (*York University*), Amerika Serikat (*Harvard University*), Australia (*Sydney University*), Singapura (*National University of Singapore* dan *Nanyang Technological University*) dan Inggris (*University of Bristol*).

Buku terbitan tahun 2008 ini merupakan kumpulan artikel yang ditulis Acharya di berbagai koran. Artikel-artikel yang ditulis dalam rentang waktu 2002 hingga 2006 tersebut kemudian dikodifikasi menjadi buku. Setelah dibukukan, beberapa judul artikel pun ikut disesuaikan, karena perbedaan konteks tulisan untuk surat kabar dan buku.

Sebagai kumpulan artikel, salah satu kekuatan buku ini adalah topiknya yang *'update'*. Artikel untuk koran biasanya menanggapi hal-hal terbaru yang sedang terjadi. Apalagi, jika artikel tersebut ditulis oleh seorang yang memiliki nama besar seperti Amitav Acharya, maka ketajaman analisis penulis terhadap fenomena terbaru tidak perlu diragukan keilmuannya. Meski buku ini merupakan kumpulan artikel yang pendek-pendek (biasanya satu tulisan hanya sepanjang 3-5 halaman), tetapi Acharya melakukan kategorisasi dengan rapi. Artikel-artikel dibagi berdasarkan tema-tema berikut: Bab I *China's Rise and the East Asian Community* (membahas mengenai kebangkitan Cina), Bab II *A Historical Legacy* (mengenai Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955), Bab III *Transnational Dangers* (membahas bentuk ancaman keamanan baru seperti tsunami, SARS, terorisme, dan lain-lain), Bab IV *ASEAN: Regressing or Reinventing?* (mengenai peranan organisasi Association of South East Asia Nations/ASEAN), Bab V *Democracy and Regional Order* (tentang demokrasi di Asia), serta yang terakhir Bab VI *The Changing World Order: Implications for Asia* (bagaimana tatanan dunia yang berubah mempengaruhi Asia).

Argumen utama dari buku ini adalah kemampuan Asia untuk memimpin dunia tak hanya tergantung dari pertumbuhan negara-negara Asia yang memang saat ini sedang pesat, yakni Cina, India dan Jepang, namun sangat tergantung pada bagaimana wilayah ini mengatasi persaingan internal dan bekerjasama mengatasi berbagai masalah antarbangsa. Karenanya, konflik dan kerjasama adalah dua kata kunci dalam buku ini. Itulah sebabnya,

tidak heran apabila buku ini kemudian dekat sekali dengan realisme. Hal ini mudah diidentifikasi dari munculnya istilah-istilah seperti hegemoni regional, *balance of power*, bipolar, peran negara yang dominan, kepentingan negara dan lain-lain.

Buku ini memang telah dibagi ke dalam beberapa topik, tetapi penulis menemukan bahwa topik yang sering dibicarakan dalam buku ini sebenarnya adalah kebangkitan Cina serta peranan ASEAN. Tidak aneh bila ASEAN menjadi salah satu topik yang sering muncul karena Amitav Acharya sendiri sebelumnya memang sering menulis mengenai Asia Tenggara dan organisasi regionalnya, ASEAN.

Bob Hadiwinata, seorang akademisi senior HI di Indonesia, dalam *paper*-nya untuk ICOSEAS (*International Conference of South East Asian Studies*) di Universitas Islam Indonesia tanggal 4 Desember 2015 menyatakan bahwa karya Amitav Acharya membuat ASEAN menjadi lebih dipahami oleh penstudi HI lainnya. Pendekatan konstruktivis yang digunakan Acharya membuat ASEAN dipahami sebagai sebuah komunitas yang berbeda dari Uni Eropa (UE), dan orang-orang mulai melihat ASEAN secara adil dan tidak terus membandingkannya dengan UE, organisasi regional pendahulunya (Hadiwinata, 2015: 7).

Penulis sendiri berpendapat, walaupun Acharya memang mengatakan bahwa ASEAN memiliki mekanismenya sendiri, bukan berarti Acharya tidak mengkritisi kelemahan-kelemahan organisasi itu. Setelah membaca buku ini, penulis mendapat kesan bahwa Acharya sebenarnya tidak terlalu optimis terhadap ASEAN. Meskipun ia mengatakan bahwa kawasan Asia sendiri adalah

kawasan dinamis, namun tetap saja, terhadap ASEAN, Acharya mengkritisi ASEAN sebagai suatu organisasi yang punya banyak kelemahan. Acharya bahkan menyebut ASEAN sebagai *'allegedly sunset organisation'* (hal. 87). Sementara di artikel lain ia menyebutkan dengan jelas bahwa *"...ASEAN does not lack institutions, but many of these institutions remain underused."* (hal. 119).

Penulis berargumen, bahwa Acharya memperlakukan ASEAN dan Asia dengan cara berbeda. Ia mengkritisi ASEAN karena memang melihat ASEAN sebagai organisasi regional dan peranannya yang tidak terlalu signifikan di wilayah itu. Namun, untuk konteks Asia sebagai suatu kawasan, Acharya memang menyimpan optimisme tersendiri. Lebih lanjut, Acharya berpendapat, Asia akan tetap dengan ciri khasnya, yang tidak selalu cocok dengan teori dari dunia Barat. Mengutip dari buku ini, Acharya menulis, *"Asia will maintain its own distinctive course, combining aspects of Confucian communitarianism, Kautilyaan realism and Nehruvian liberalism. Its future will be shaped not just by global events and Western ideas, but also by its own historical rhythms, ideas, approaches and internal political/strategic configurations."* (hal. 17). Dengan kata lain, kawasan Asia adalah sebuah wilayah yang masih 'tumbuh'. Apa yang kita lihat sekarang di Asia sendiri merupakan *'process in the making'*. Dengan dinamika hubungan antarnegara yang juga kadang masuk dalam ranah konflik dan kerjasama, sulit untuk menebak ujung dari pergolakan kepemimpinan Asia, di tengah persaingan antara Cina, India dan Jepang terhadap wilayah itu.

Walaupun banyak mengkritisi ASEAN, pada tulisannya yang ke-20, di bab ini ia memberikan banyak masukan pada ASEAN (hal. 91-95). Secara keseluruhan, dalam buku ini Acharya memberikan berbagai rekomendasi atau saran terhadap ASEAN dan bagaimana harusnya ASEAN merespon terhadap berbagai perubahan yang terjadi padanya. Hal yang perlu digarisbawahi, buku ini adalah kumpulan artikel untuk koran, dimana Acharya bisa menulis lebih 'luwes', berbeda dengan penulisan untuk jurnal atau karya ilmiah. Sehingga tidak mengherankan apabila Acharya mudah melancarkan kritik dan saran terhadap organisasi ASEAN.

Selain mengenai ASEAN, hal lain dari buku ini adalah mengenai identitas, terutama dalam politik (hal. 31-34). Acharya mengatakan, bahwa, "*...it is important to be careful about bringing history to the table in forging good neighbourly relations. History can be a double-edge sword.*" (hal.33). Melihat konteks sekarang, sebenarnya identitas lebih dibentuk dalam tatanan politis, tidak lagi karena sejarah atau ras. Menurut hemat penulis, ada kalanya kita tidak harus terus melihat ke belakang, apalagi terus-menerus mempermasalahkan perbedaan budaya antarbangsa. Secara politis, identitas akan terus berubah, sama seperti ketika *Bandung Conference* 1955 yang dulu melihat negara-negara Asia Selatan "*Colombo Powers*" sebagai rekan, namun nyatanya identitas tersebut semakin terlupakan saat ini.

Mengingat buku ini yang pada awalnya merupakan konsumsi media massa, Acharya tidak menyertakan catatan kaki atau sumber lain untuk mendukung pernyataannya. Beberapa tesis-nya mungkin perlu dipertegas dengan referensi dari buku atau jurnal

lain, terutama bila buku ini akan dijadikan salah satu rujukan untuk penulisan karya ilmiah. Salah satu kelebihan buku ini adalah karena memang ditujukan untuk media massa dengan tujuan pembaca yang tentunya lebih luas dan beragam daripada kalangan akademisi, Amitav menulis dengan gaya bahasa yang tidak terlalu rumit, yang tentunya berbeda dengan penulisan untuk jurnal atau karya ilmiah. Karya yang ditujukan untuk pembaca di media massa tentu lebih umum dan lebih luas, sehingga tulisan ini bisa dibaca oleh orang awam, baik mereka yang baru mendalami *Asian Studies* dan Hubungan Internasional, atau bagi pembaca yang sekedar ingin menambah pengetahuan tentang dinamika di Benua Asia.

Referensi

Hadiwinata, Bob S. (2015, Desember). ASEAN : a Misconstrued Regionalism. *Paper presented at the General Lectures of ICOSEAS (International Conference of Southeast Asian Studies)*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Agus Subagyo, lahir di Sukoharjo, 18 April 1978. Memperoleh gelar Sarjana (S.IP) dalam Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2000. Gelar Magister (M.Si) diperoleh dari Program Studi Ilmu Politik, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2002. Gelar Doktor Ilmu Politik (Dr) diperoleh dari FISIPOL UGM tahun 2013. Kajian yang diminati lebih pada isu-isu politik internasional, keamanan, manajemen resolusi konflik dan studi perdamaian. Saat ini, selain sebagai Dekan FISIP UNJANI, juga adalah Dosen Tetap Senior di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani. Dapat dihubungi melalui *email*: agus.subagyo@lecture.unjani.ac.id

Yovinus, merupakan dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani. Adapun riwayat pendidikannya adalah S2 Ilmu Politik dan S3 HI Konsentrasi Ilmu Politik. Adapun ketertarikan penelitiannya lebih pada Politik Lokal, Politik Kawasan dan Politik Global; Studi Wilayah Perbatasan Khususnya Sosek Malindo; Pemilu, Demokrasi dan Globalisasi; Kebijakan Publik, Otonomi Daerah, Politik Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Dapat dihubungi melalui dr_yovinus@yahoo.co.id

Kiki Esa Perdana merupakan staf pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sangga Buana, Bandung. Riwayat pendidikan adalah menyelesaikan S1 Hubungan Internasional Universitas Pasundan serta S2 di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Minat kajian dan penelitiannya adalah pada komunikasi politik, media dan diplomasi, komunikasi bisnis dan komunikasi antarbudaya. Dapat dihubungi melalui: kikiesaperdana@yahoo.com

Jeniar Mooy Penulis merupakan mahasiswa tingkat akhir di Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran yang *concern* terhadap studi Hukum Internasional dan *Asia Pacific Development*. Dapat dihubungi melalui jeniarmooy6@gmail.com

Jafar Alkadrie Penulis merupakan Penstudi Hubungan Internasional di FISIP Universitas Padjadjaran yang memiliki minat terhadap bidang pertahanan keamanan, studi Kawasan serta

penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Dapat dihubungi melalui alkadriejafar@gmail.com

Yeyen Subandi adalah Dosen Tetap di Universitas Darussalam, Gontor. Memiliki ketertarikan terhadap isu-isu kemanusiaan. Menyelesaikan Magister Hubungan Internasional di UGM. Dapat dihubungi melalui *email*: yeyen.subandi@unida.gontor.ac.id

Kristyono Ratmoko, adalah dosen senior di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani. Riwayat pendidikan Strata 1 di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada dan S2 di Universitas Katolik Parahyangan. Spesialisasi dalam kajian dan penelitian kawasan dan regionalisme serta HI di Timur Tengah. Dapat dihubungi melalui krisratmoko@gmail.com

Yusep Ginanjar, merupakan staf pengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani. Riwayat pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani serta S2 di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Minat kajian dan penelitiannya adalah pada isu-isu diplomasi dalam Hubungan Internasional dan otonomi daerah, paradiplomasi, serta keamanan. Adapun penulis dapat dihubungi melalui *email*: yugin.ginanjar@yahoo.com

Zaenal Abidin AS Penulis mempunyai riwayat pendidikan yaitu S1 Universitas Jenderal Achmad Yani Ilmu Pemerintahan dan S2 di Universitas Gadjah Mada dengan disiplin ilmu Ketahanan Nasional. Saat ini peneliti merupakan dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Jenderal Achmad Yani. Konsentrasi kajian peneliti saat ini lebih pada isu-isu ketahanan nasional dan resolusi konflik. Dapat dihubungi melalui m.zaenal27@gmail.com

Jusmalia Oktaviani merupakan staf pengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi.

Lulus dari S1 Hubungan Internasional di Universitas Mulawarman Samarinda dan S2 Hubungan Internasional Konsentrasi Diplomasi Humaniter Global Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Minat penelitiannya adalah pada isu-isu kemanusiaan, diplomasi publik serta isu-isu lingkungan. Dapat dihubungi melalui: oktavianijusmalia@gmail.com / jusmalia.oktaviani@lecture.unjani.ac.id

PANDUAN PENULISAN JURNAL DINAMIKA GLOBAL

1. Artikel harus orisinal bukan merupakan karya plagiasi, tidak pernah dimuat di media atau penerbitan lain.
2. Artikel yang ditulis meliputi hasil pemikiran atau hasil penelitian dalam lingkup ilmu Hubungan Internasional. Naskah diketik dengan Bookman Old Style, ukuran 12 pts, dengan spasi 1,5, dicetak pada kertas A4 dengan panjang tulisan 3000-4000 kata (sudah termasuk abstrak dan daftar pustaka, 100-150 kata yang mencakup uraian secara singkat mengenai isi dan ruang lingkup tulisan serta temuan yang disertai dengan 4-5 *keyword/* kata kunci) dibuat dengan *Microsoft Word* dengan format *doc* atau *rtf*.
3. Melampirkan nama lengkap, profil singkat (pekerjaan/jabatan/publikasi ilmiah/bidang peminatan (*research interest*) dalam ilmu HI) dan kontak yang dapat dihubungi (nomor *handphone* dan alamat *e-mail*) dan mengirimkan *file* tulisan ke alamat *e-mail*:
dinamikaglobal@unjani.ac.id atau
dinamikaglobal93@gmail.com.
4. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, nama penulis utama dicantumkan sebagai penulis pertama, diikuti oleh penulis lainnya. Bagi naskah yang ditulis oleh sebuah tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang nama-nya tercantum pada urutan pertama tersebut. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat ***email***.
5. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format esai, disertai judul pada masing-masing bagian artikel. Bagian pendahuluan disajikan tanpa judul bagian.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran atau penelitian adalah: judul, nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak (100-

150 kata); kata kunci; pendahuluan; pembahasan; kesimpulan; daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).

7. Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan pustaka-pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang diutamakan adalah sumber-sumber primer berupa laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi) atau artikel-artikel penelitian dalam jurnal dan/atau majalah ilmiah.
8. Pengutipan menggunakan ***running-notes/text-notes/body-notes*** dengan mengacu kepada ***'Harvard Reference Style'***. Panduan tersebut bisa diunduh di laman **<http://openjournals.net/files/Ref/HARVARD2009%20Reference%20guide.pdf>**
9. Penulisan daftar rujukan atau daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabetis nama belakang penulis utama.
10. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan isi artikel yang dikirim.

Panduan Penulisan Tinjauan Buku

1. Tinjauan Buku merupakan tinjauan buku dalam lingkup studi ilmu Hubungan Internasional. Naskah diketik dengan Bookman Old Style, ukuran 12 pts, dengan spasi 1.5, dicetak pada kertas A4 dengan panjang tulisan maksimal 1000 kata, dibuat dengan *Microsoft Word* dengan format *doc* atau *rtf*. Pengiriman *file* juga dapat dilakukan sebagai *attachment e-mail* ke alamat: dinamikaglobal@unjani.ac.id.
2. Nama penulis Tinjauan Buku dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul Tinjauan Buku. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat *e-mail* untuk memudahkan komunikasi.
3. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris dengan format esai, disertai judul buku, tahun buku, penulis buku, penerbit, di setiap bagian.
4. Tinjauan Buku diharapkan *me-review* atau meninjau buku yang baru terbit paling tidak 5 tahun.

